

DARI PERTUMBUHAN KE PEMERATAAN

Agenda Peningkatan Ekonomi Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

RudyCT Academic Series 2026

DARI PERTUMBUHAN KE PEMERATAAN: AGENDA PENINGKATAN EKONOMI INDONESIA



Pertumbuhan yang inklusif, kesempatan kerja produktif, kelas menengah yang kuat, dan pembangunan yang lebih merata.



PENDIDIKAN
BERKUALITAS



KESEHATAN
UNTUK SEMUA



PERUMAHAN
LAYAK



TRANSPORTASI
TERINTEGRASI



UMKM
BERDAYA SAING



MENDORONG KESEIMBANGAN, KEADILAN,
DAN KESEMPATAN BAGI SEMUA

AGENDA UTAMA UNTUK EKONOMI INDONESIA



PERTUMBUHAN INKLUSIF

Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat.



PEKERJAAN BERKUALITAS

Menciptakan kesempatan kerja produktif dan berdaya saing.



PRODUKTIVITAS

Meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk nilai tambah tinggi.



PEMERATAAN WILAYAH

Pembangunan yang merata antarwilayah dan desa-kota.



KELAS MENENGAH

Memperkuat kelas menengah sebagai pilar ekonomi nasional.



TRANSFORMASI DIGITAL

Digitalisasi ekonomi untuk efisiensi, inklusi, dan daya saing global.



Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudycct.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)



Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi pertumbuhan tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Suatu perekonomian dapat mencatat kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif kuat sementara sebagian rumah tangga masih menghadapi pendapatan stagnan, pekerjaan informal, biaya perumahan tinggi, akses pendidikan dan kesehatan yang timpang, serta keterbatasan mobilitas sosial. Artikel ini membahas agenda peningkatan ekonomi Indonesia melalui pergeseran orientasi dari sekadar mengejar pertumbuhan agregat menuju pertumbuhan yang memperluas produktivitas, kesempatan, aset, dan kualitas hidup. Data resmi terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pada saat yang sama, kemiskinan September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang, sedangkan Gini Ratio pengeluaran turun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Kemajuan tersebut penting, tetapi agenda pemerataan masih panjang karena kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi daripada perkotaan, struktur ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, ketimpangan kualitas pekerjaan serta kepemilikan aset masih besar, dan kelompok rentan di sekitar kelas menengah mudah tertekan oleh guncangan biaya hidup. Artikel mengembangkan kerangka 'Growth-to-Distribution Transmission', yaitu lima saluran yang menentukan apakah pertumbuhan berubah menjadi kesejahteraan yang lebih merata: pekerjaan dan upah, produktivitas usaha, kepemilikan aset, layanan publik dan perlindungan sosial, serta pemerataan wilayah. Pembahasan mencakup transformasi struktural, kualitas pekerjaan, sektor informal, produktivitas UMKM, upah riil, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, ketahanan pangan, fiskal, perpajakan, subsidi, perlindungan sosial, desentralisasi, hilirisasi, ekonomi digital, AI, ekonomi hijau, kepemilikan aset, gender, pemuda, dan pembangunan desa. Artikel menekankan bahwa pemerataan bukan pembagian pendapatan setelah pertumbuhan selesai, melainkan desain pertumbuhan sejak awal. Investasi, industri, teknologi, dan infrastruktur harus dirancang agar meningkatkan kapasitas masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan berproduktivitas tinggi. Agenda yang diusulkan meliputi penciptaan pekerjaan formal produktif, penguatan perusahaan menengah, supplier development, universal basic services berkualitas, reformasi perlindungan sosial adaptif, perumahan dan transportasi terjangkau, fiscal equalization yang lebih efektif, peningkatan kapasitas daerah, perluasan kepemilikan aset produktif, serta transformasi digital yang inklusif. Kesimpulan utama adalah bahwa Indonesia tidak harus memilih antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan yang lebih merata justru dapat memperkuat produktivitas, permintaan domestik, stabilitas sosial, human capital, dan legitimasi pembangunan, sehingga menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat.

Kata Kunci

pertumbuhan ekonomi; pemerataan; ketimpangan; kemiskinan; kelas menengah; produktivitas; pekerjaan; kebijakan fiskal; pembangunan daerah; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relatif kuat. BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan PDB per kapita Rp83,7 juta; pada triwulan I-2026 ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Namun pertumbuhan agregat perlu dibaca bersama kualitas distribusinya.

Kemiskinan resmi September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perdesaan 10,72 persen masih lebih tinggi daripada perkotaan 6,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan wilayah dan produktivitas perdesaan tetap menjadi agenda penting.

Gini Ratio pengeluaran turun menjadi 0,363 pada September 2025. Perbaikan ini positif, tetapi ukuran pengeluaran tidak menangkap seluruh ketimpangan kekayaan, kepemilikan tanah, perumahan, akses pendidikan bermutu, atau keamanan pekerjaan.

Pertumbuhan menjadi inklusif ketika transmisi ke rumah tangga berlangsung melalui pekerjaan produktif, kenaikan upah riil, usaha yang naik kelas, aset yang makin luas dimiliki, serta layanan publik yang menurunkan biaya hidup.

Pemerataan bukan hanya kebijakan transfer. Pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, air, internet, dan keamanan merupakan 'social wage' yang menentukan berapa besar pendapatan efektif rumah tangga.

Transformasi struktural perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan berproduktivitas menengah-tinggi. Hilirisasi, manufaktur, jasa modern, ekonomi digital, dan ekonomi hijau perlu memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja, UMKM, dan daerah.

Pemerataan spasial memerlukan lebih dari memindahkan proyek ke luar Jawa. Daerah harus memperoleh supplier, universitas, keterampilan, kota yang layak, transportasi, dan kapasitas fiskal sehingga investasi menciptakan ekosistem lokal.

Fiskal harus menyeimbangkan produktivitas dan redistribusi. Belanja sosial yang tepat sasaran penting, tetapi investasi human capital, childcare, transportasi umum, perumahan, serta reformasi pajak dan subsidi menentukan distribusi jangka panjang.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Mengapa Pertumbuhan Saja Tidak Cukup
2. Kondisi Ekonomi dan Distribusi Indonesia 2025-2026
3. Memahami Pertumbuhan Inklusif
4. Dari PDB menuju Kesejahteraan Multidimensi
5. Kemiskinan, Kerentanan, dan Kelas Menengah
6. Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran, dan Kekayaan
7. Pekerjaan sebagai Saluran Utama Pemerataan
8. Upah Riil, Produktivitas, dan Kualitas Kerja
9. Sektor Informal dan Transisi ke Formalitas
10. UMKM, Perusahaan Menengah, dan Mobilitas Ekonomi
11. Pendidikan dan Mobilitas Sosial
12. Kesehatan sebagai Modal Produktif
13. Perumahan, Transportasi, dan Biaya Hidup
14. Pangan, Inflasi, dan Daya Beli
15. Perlindungan Sosial dan Ketahanan Rumah Tangga
16. Perpajakan, Subsidi, dan Redistribusi
17. Desentralisasi dan Ketimpangan Antar-Daerah
18. Hilirisasi yang Inklusif
19. Transformasi Digital dan Risiko Kesenjangan Baru
20. Ekonomi Hijau dan Just Transition
21. Gender, Pemuda, dan Kelompok Rentan
22. Desa, Kota Kecil, dan Pusat Pertumbuhan Baru
23. Studi Kasus Analitis
24. Peta Jalan Pemerataan 2026-2045
25. Kesimpulan: Pertumbuhan yang Memperluas Kesempatan

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Mengapa Pertumbuhan Saja Tidak Cukup

PDB mengukur aktivitas ekonomi. Dalam konteks 1. pendahuluan: mengapa pertumbuhan saja tidak cukup, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Distribusi menentukan siapa menikmati hasil. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Kualitas kerja memengaruhi transmisi. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Layanan publik memengaruhi pendapatan efektif. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Pemerataan perlu dirancang sejak awal. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

2. Kondisi Ekonomi dan Distribusi Indonesia 2025-2026

Pertumbuhan tetap kuat. Dalam konteks 2. kondisi ekonomi dan distribusi indonesia 2025-2026, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kemiskinan menurun. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Ketimpangan pengeluaran membaik. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Konsentrasi spasial tetap tinggi. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Agenda berikutnya adalah kualitas. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih

merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

3. Memahami Pertumbuhan Inklusif

Inklusif berarti kesempatan luas. Dalam konteks 3. memahami pertumbuhan inklusif, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Pertumbuhan harus menciptakan partisipasi. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Redistribusi tetap diperlukan. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Produktivitas dan fairness saling terkait. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Institusi menentukan distribusi. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

4. Dari PDB menuju Kesejahteraan Multidimensi

Pendapatan bukan satu-satunya dimensi. Dalam konteks 4. dari pdb menuju kesejahteraan multidimensi, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kesehatan dan pendidikan penting. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Waktu serta keamanan juga bernilai. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Lingkungan memengaruhi kesejahteraan. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Dashboard diperlukan. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

5. Kemiskinan, Kerentanan, dan Kelas Menengah

Garis kemiskinan penting tetapi sempit. Dalam konteks 5. kemiskinan, kerentanan, dan kelas menengah, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Banyak rumah tangga berada dekat ambang. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Guncangan dapat mendorong kembali miskin. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Kelas menengah membutuhkan stabilitas. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Mobilitas perlu diukur. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

6. Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran, dan Kekayaan

Gini mengukur distribusi. Dalam konteks 6. ketimpangan pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kekayaan lebih terkonsentrasi. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Aset menentukan ketahanan. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Warisan memengaruhi peluang. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kebijakan perlu menyentuh aset. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

7. Pekerjaan sebagai Saluran Utama Pemerataan

Pekerjaan menghubungkan pertumbuhan dan rumah tangga. Dalam konteks 7. pekerjaan sebagai saluran utama pemerataan, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kualitas lebih penting dari jumlah. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Formalitas memberi perlindungan. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Produktivitas menentukan upah. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Job-rich growth diperlukan. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

8. Upah Riil, Produktivitas, dan Kualitas Kerja

Upah perlu tumbuh bersama produktivitas. Dalam konteks 8. upah riil, produktivitas, dan kualitas kerja, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Inflasi menggerus pendapatan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Skill memperluas wage ladder. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Bargaining power penting. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Perusahaan produktif membayar lebih baik. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

9. Sektor Informal dan Transisi ke Formalitas

Informalitas memberi fleksibilitas. Dalam konteks 9. sektor informal dan transisi ke formalitas, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Produktivitas sering rendah. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Compliance cost berperan. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Formalitas harus memberi manfaat. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Transisi perlu bertahap. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

10. UMKM, Perusahaan Menengah, dan Mobilitas Ekonomi

UMKM penting bagi pekerjaan. Dalam konteks 10. umkm, perusahaan menengah, dan mobilitas ekonomi, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Tidak semua usaha berorientasi tumbuh. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Missing middle membatasi rantai nilai. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Finance dan management penting. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Digitalisasi harus produktif. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%

Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

11. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Pendidikan memperluas peluang. Dalam konteks 11. pendidikan dan mobilitas sosial, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kualitas berbeda antarwilayah. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Early childhood memiliki efek panjang. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

TVET harus terhubung pekerjaan. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Perguruan tinggi perlu relevan. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

12. Kesehatan sebagai Modal Produktif

Kesehatan memengaruhi kerja dan belajar. Dalam konteks 12. kesehatan sebagai modal produktif, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Biaya sakit dapat memiskinkan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Primary care penting. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Gizi menentukan human capital. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kualitas layanan harus merata. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

13. Perumahan, Transportasi, dan Biaya Hidup

Lokasi menentukan kesempatan. Dalam konteks 13. perumahan, transportasi, dan biaya hidup, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Perumahan mahal menekan kelas menengah. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Transportasi publik menurunkan biaya. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Sprawl meningkatkan beban. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kota inklusif memperluas akses. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

14. Pangan, Inflasi, dan Daya Beli

Pangan dominan bagi rumah tangga bawah. Dalam konteks 14. pangan, inflasi, dan daya beli, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Volatilitas berdampak regresif. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Produktivitas pertanian penting. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Logistik menurunkan spread. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kebijakan stok harus kredibel. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

15. Perlindungan Sosial dan Ketahanan Rumah Tangga

Transfer melindungi konsumsi minimum. Dalam konteks 15. perlindungan sosial dan ketahanan rumah tangga, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Shock membutuhkan sistem adaptif. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Data penerima perlu dinamis. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Graduasi tidak boleh terlalu tajam. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Layanan dan cash perlu terintegrasi. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

16. Perpajakan, Subsidi, dan Redistribusi

Pajak membiayai negara. Dalam konteks 16. perpajakan, subsidi, dan redistribusi, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Basis pajak perlu luas dan adil. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Subsidi universal dapat regresif. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Tax expenditure perlu dievaluasi. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Redistribusi harus pro-produktivitas. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan

Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha
------	---	------------------------

17. Desentralisasi dan Ketimpangan Antar-Daerah

Daerah memiliki kapasitas berbeda. Dalam konteks 17. desentralisasi dan ketimpangan antar-daerah, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Transfer fiskal menyeimbangkan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Kualitas belanja menentukan hasil. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Local revenue perlu sehat. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kolaborasi regional penting. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

18. Hilirisasi yang Inklusif

Hilirisasi menaikkan nilai tambah. Dalam konteks 18. hilirisasi yang inklusif, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Linkage menentukan pemerataan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Pekerja lokal perlu skill. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Daerah harus memperoleh multiplier. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Energi dan lingkungan penting. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

19. Transformasi Digital dan Risiko Kesenjangan Baru

Digital membuka pasar. Dalam konteks 19. transformasi digital dan risiko kesenjangan baru, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kesenjangan skill dapat melebar. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Platform menciptakan konsentrasi. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

AI mengubah pekerjaan. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Digital public infrastructure membantu. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

20. Ekonomi Hijau dan Just Transition

Transisi menciptakan pekerjaan baru. Dalam konteks 20. ekonomi hijau dan just transition, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Sektor lama dapat menurun. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Pekerja perlu reskilling. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Daerah perlu diversifikasi. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Beban transisi harus adil. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

21. Gender, Pemuda, dan Kelompok Rentan

Partisipasi ekonomi tidak merata. Dalam konteks 21. gender, pemuda, dan kelompok rentan, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Care burden memengaruhi perempuan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Pemuda menghadapi school-to-work transition. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Disabilitas membutuhkan akses. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Inklusi memperbesar produktivitas. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

22. Desa, Kota Kecil, dan Pusat Pertumbuhan Baru

Urbanisasi perlu tersebar. Dalam konteks 22. desa, kota kecil, dan pusat pertumbuhan baru, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Kota kecil dapat menjadi hub. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Desa membutuhkan konektivitas. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Agroprocessing memperkuat lokal. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Layanan dasar menarik talenta. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

23. Studi Kasus Analitis

Kasus memperlihatkan mekanisme. Dalam konteks 23. studi kasus analitis, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Trade-off perlu dievaluasi. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Data lokal penting. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Pemerataan memiliki banyak saluran. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Kebijakan harus adaptif. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

24. Peta Jalan Pemerataan 2026-2045

Pekerjaan produktif menjadi inti. Dalam konteks 24. peta jalan pemerataan 2026-2045, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Layanan dasar universal ditingkatkan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Aset serta usaha diperluas. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Wilayah diperkuat. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Evaluasi distribusi dilembagakan. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Pertumbuhan	Apakah output meningkat secara berkelanjutan?	PDB riil, produktivitas
Pekerjaan	Apakah pekerjaan berkualitas bertambah?	Formalitas, upah riil
Distribusi	Apakah hasil menyebar?	Gini, bottom 40%
Kemiskinan	Apakah kerentanan menurun?	Poverty, near-poor
Wilayah	Apakah gap spasial mengecil?	PDRB/kapita, layanan
Aset	Apakah rumah tangga membangun kekayaan?	Rumah, tabungan, usaha

25. Kesimpulan: Pertumbuhan yang Memperluas Kesempatan

Pertumbuhan tetap diperlukan. Dalam konteks 25. kesimpulan: pertumbuhan yang memperluas kesempatan, pertanyaan pokoknya bukan hanya apakah ekonomi menghasilkan lebih banyak, tetapi bagaimana tambahan nilai tersebut bergerak melalui rumah tangga, perusahaan, wilayah, dan institusi. Pertumbuhan agregat dapat koeksis dengan ketidakpuasan bila transmisi ke pendapatan serta pelayanan berlangsung lemah.

Pemerataan memperkuat pertumbuhan. Pemerataan tidak identik dengan membuat semua pendapatan sama. Pemerataan berarti memperluas peluang untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan produktif, modal, pasar, kesehatan, perumahan, konektivitas, dan perlindungan dari guncangan. Perbedaan hasil masih dapat muncul, tetapi titik awal dan aturan permainan harus lebih adil.

Kesempatan harus nyata. Produktivitas merupakan jembatan penting antara efisiensi dan distribusi. Perusahaan yang produktif memiliki ruang untuk membayar upah lebih baik, berinvestasi, dan menurunkan harga. Namun bila pasar sangat terkonsentrasi atau bargaining pekerja lemah, kenaikan produktivitas tidak otomatis diteruskan kepada rumah tangga.

Aset dan layanan menentukan. Kebijakan publik perlu melihat pendapatan efektif, yaitu pendapatan setelah memperhitungkan biaya perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan. Layanan publik berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa harus seluruhnya melalui kenaikan uang tunai.

Indonesia dapat menggabungkan keduanya. Dimensi wilayah sangat penting bagi Indonesia. Jarak, kepulauan, kualitas pemerintah daerah, infrastruktur, dan struktur ekonomi menciptakan peluang yang berbeda. Pemerataan nasional membutuhkan strategi place-based yang tetap terhubung dengan standard nasional.

Karena itu, strategi pemerataan yang efektif harus menggabungkan pre-distribution dan redistribution. Pre-distribution membentuk pasar kerja, pendidikan, aset, persaingan, dan infrastruktur agar hasil awal lebih merata; redistribution menggunakan pajak, transfer, dan layanan sosial untuk mengoreksi ketimpangan yang masih tersisa.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Hilirisasi Mineral dan Kota Industri

Investasi besar dapat menaikkan PDRB daerah, tetapi pemerataan bergantung pada berapa banyak tenaga kerja lokal masuk pekerjaan teknis, berapa supplier lokal tumbuh, bagaimana pendapatan pajak digunakan, serta apakah biaya perumahan dan lingkungan terkendali.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 2: Kawasan Industri di Luar Jawa

Relokasi atau investasi baru di luar Jawa dapat memperluas basis ekonomi. Namun tanpa politeknik, kota yang layak, jaringan pemasok, pelabuhan, dan layanan kesehatan, kawasan mudah menjadi enclave yang mengimpor tenaga kerja serta input.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 3: Digitalisasi UMKM

Marketplace dapat meningkatkan penjualan, tetapi manfaat jangka panjang lebih kuat ketika UMKM memperbaiki pembukuan, inventory, quality, akses kredit, serta kemampuan produksi. Digital marketing saja tidak cukup menaikkan produktivitas.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 4: Transportasi Umum Perkotaan

Transit menurunkan waktu serta biaya perjalanan bagi pekerja, memperluas radius pekerjaan yang dapat dijangkau, dan menaikkan nilai lahan. Tanpa kebijakan perumahan, kenaikan nilai lahan dapat mendorong kelompok bawah keluar dari lokasi strategis.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 5: Perumahan Terjangkau

Subsidi rumah dapat memperluas kepemilikan aset, tetapi lokasi yang jauh dari pekerjaan menciptakan biaya transportasi serta waktu. Housing policy perlu terintegrasi dengan tata ruang dan transit.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 6: Program Transfer Tunai

Transfer tunai efektif melindungi konsumsi saat shock, tetapi tidak otomatis menghasilkan mobilitas ekonomi. Kombinasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, childcare, dan employment service memberi jalur keluar dari kerentanan.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 7: Pertanian Produktif dan Harga Pangan

Peningkatan produktivitas petani dapat menaikkan pendapatan sekaligus membantu stabilitas harga. Infrastruktur pascapanen, storage, logistics, dan informasi pasar sering memberi manfaat distribusi yang besar.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 8: Ekonomi Digital dan Platform

Platform mengurangi biaya pencarian serta transaksi, tetapi network effect dapat memperkuat posisi dominan. Interoperability, data portability, dan competition membantu agar produsen serta konsumen memperoleh bagian manfaat yang wajar.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 9: Industri Hijau dan Pekerja Lama

Penutupan bertahap aset intensif karbon dapat menurunkan pekerjaan lokal. Just transition membutuhkan pemetaan pekerja, reskilling, diversification, serta dukungan fiskal untuk daerah.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 10: Pendidikan Vokasi dan Industri

Sekolah vokasi yang terhubung apprenticeship lebih mungkin menghasilkan employment. Namun terlalu spesifik pada satu perusahaan dapat menimbulkan risiko jika teknologi berubah. Fondasi umum dan skill adaptable tetap penting.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 11: Kota Kecil sebagai Hub Regional

Kota kecil yang memiliki rumah sakit, kampus, pasar, logistik, dan internet dapat menjadi pusat layanan bagi kabupaten sekitar. Investasi di kota tier-2 dapat mengurangi tekanan metropolitan dan memperluas kesempatan.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Kasus 12: Pajak Properti dan Nilai Tanah

Investasi publik menaikkan nilai tanah. Pajak properti serta land value capture dapat mengembalikan sebagian kenaikan ke publik untuk membiayai transportasi, perumahan, dan ruang publik.

Pelajaran utama adalah bahwa outcome distribusi bergantung pada desain kelembagaan, bukan hanya besarnya proyek atau belanja. Pemerataan perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah ketimpangan muncul.

Pendalaman Teoretis

A. Kuznets dan Transformasi Struktural

Hipotesis Kuznets secara klasik menggambarkan kemungkinan ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan lalu menurun ketika ekonomi matang. Namun pola tersebut bukan hukum alam. Kebijakan pendidikan, kepemilikan aset, pajak, urbanisasi, dan institusi pasar kerja dapat mengubah lintasan.

Transformasi dari pertanian ke industri dapat meningkatkan ketimpangan jika pekerjaan modern hanya tersedia bagi sebagian kecil penduduk. Ketika pendidikan serta migrasi memperluas akses, gap dapat menyempit.

Ekonomi modern menambah tantangan karena digitalisasi dan skill-biased technological change dapat meningkatkan premium bagi pekerja berpendidikan tinggi. Karena itu, human capital dan diffusion teknologi menjadi penting.

Pemerataan yang terlalu terlambat juga memiliki biaya politik dan sosial. Ketimpangan tinggi dapat menurunkan trust serta dukungan terhadap reformasi produktif.

Indonesia sebaiknya tidak menunggu pola otomatis, tetapi aktif membentuk struktur kesempatan.

B. Growth Incidence dan Bottom 40 Percent

Growth incidence curve menunjukkan bagaimana pertumbuhan pendapatan atau konsumsi berbeda sepanjang distribusi. Pertumbuhan inklusif memerlukan kelompok bawah dan menengah mengalami kenaikan nyata, bukan hanya rata-rata nasional.

Indikator bottom 40 percent membantu melihat apakah kelompok terbawah ikut memperoleh manfaat. Namun kelompok ini heterogen antara rural, urban informal, pekerja, petani, dan rumah tangga perempuan.

Pertumbuhan konsumsi dapat dipengaruhi transfer sementara, sedangkan pertumbuhan pendapatan produktif lebih berkelanjutan. Keduanya perlu dibedakan.

Analisis juga perlu melihat mobility: apakah rumah tangga yang naik bertahan atau mudah jatuh kembali setelah shock.

Policy dashboard perlu menggabungkan growth incidence, poverty transitions, dan job quality.

C. Equality of Opportunity

Ketimpangan hasil tidak seluruhnya mencerminkan ketidakadilan, tetapi ketimpangan yang berasal dari kondisi kelahiran, lokasi, gender, atau keluarga menimbulkan persoalan equality of opportunity.

Anak yang tumbuh di daerah tanpa sekolah berkualitas, gizi, internet, atau layanan kesehatan memulai perlombaan dari posisi berbeda. Investasi early childhood memiliki efek distribusi yang kuat.

Mobilitas antargenerasi dapat diukur melalui hubungan pendidikan dan pendapatan orang tua-anak. Data longitudinal masih terbatas tetapi penting.

Spatial opportunity juga menentukan. Transportasi dan migrasi memengaruhi kemampuan mengakses pekerjaan.

Equality of opportunity membuat pemerataan menjadi agenda produktivitas karena talenta dari keluarga miskin tidak terbuang.

D. Predistribution versus Redistribution

Redistribution bekerja setelah pasar menghasilkan pendapatan melalui pajak dan transfer. Predistribution membentuk distribusi sebelum pajak melalui pendidikan, upah, persaingan, kepemilikan, dan struktur pasar.

Negara membutuhkan keduanya. Transfer penting untuk kemiskinan dan shock, tetapi tidak dapat menggantikan pasar kerja yang menghasilkan pekerjaan layak.

Predistribution mencakup competition policy agar rente tidak terlalu terkonsentrasi, labor institution agar bargaining wajar, serta housing policy agar akses kota tidak hanya bagi pemilik aset.

Asset building seperti tabungan, rumah, pensiun, dan saham pekerja juga dapat memperluas kepemilikan capital income.

Strategi pemerataan Indonesia sebaiknya bergerak dari transfer-centric menuju capability-and-asset-centric tanpa melemahkan safety net.

E. Human Capital dan Social Mobility

Human capital meningkatkan produktivitas dan penghasilan, tetapi return pendidikan tergantung kualitas dan permintaan pekerjaan. Gelar tanpa skill atau tanpa job creation dapat menghasilkan underemployment.

Early nutrition memengaruhi kognisi dan kesehatan seumur hidup. Karena itu, kebijakan gizi adalah kebijakan ekonomi jangka panjang.

Teacher quality, school leadership, curriculum, dan assessment lebih penting daripada hanya jumlah gedung. Ketimpangan kualitas sekolah menghasilkan ketimpangan peluang.

Vocational education perlu terhubung industri, sedangkan pendidikan umum harus membangun literacy, numeracy, digital, dan adaptability.

Lifelong learning semakin penting karena teknologi berubah selama umur kerja.

F. Wealth Inequality dan Asset-Based Welfare

Kekayaan memberikan keamanan, collateral, pendapatan pasif, dan kemampuan menanggung risiko. Dua rumah tangga dengan pendapatan sama dapat memiliki ketahanan sangat berbeda jika satu memiliki rumah dan tabungan sementara lainnya memiliki utang.

Kebijakan pemerataan perlu melihat kepemilikan rumah, tanah, pensiun, tabungan, dan aset usaha. Financial inclusion bukan sekadar memiliki rekening tetapi kemampuan membangun net asset.

Harga tanah kota dapat menjadi mesin ketimpangan karena pemilik menikmati capital gain dari investasi publik. Land value capture dan property taxation dapat membagi kembali sebagian nilai.

Pensiun memperluas asset ownership jangka panjang dan mengurangi kemiskinan usia tua. Coverage pekerja informal menjadi tantangan.

Asset-building policy dapat menciptakan kelas menengah yang lebih tahan shock.

G. Labor Share dan Produktivitas

Pertumbuhan output tidak otomatis menaikkan upah bila bagian pendapatan tenaga kerja turun. Labor share dipengaruhi teknologi, market power, bargaining, dan struktur sektor.

Produktivitas tetap syarat fundamental karena wage growth tanpa productivity dapat menekan daya saing. Tantangannya memastikan gain produktivitas dibagi melalui competition serta labor institutions.

Minimum wage dapat melindungi pekerja bawah tetapi perlu disesuaikan produktivitas, kondisi daerah, dan enforcement. Terlalu tinggi dapat mendorong informalitas; terlalu rendah tidak memberi social floor.

Collective bargaining dan worker voice dapat memperbaiki informasi serta fairness, tetapi perlu mencegah rigiditas ekstrem.

Perusahaan yang naik kelas melalui technology dan management biasanya mampu memberikan wage ladder yang lebih baik.

H. Spatial Economics dan Agglomeration

Aglomerasi meningkatkan produktivitas melalui matching, sharing, dan learning. Karena itu, konsentrasi di kota atau Jawa tidak selalu negatif. Masalah muncul ketika akses ke aglomerasi tertutup atau daerah lain tidak memiliki jalur koneksi.

Transportasi menurunkan distance cost dan memungkinkan orang dari pinggiran mengakses pekerjaan kota. Internet memperluas sebagian jasa, tetapi barang dan manusia tetap membutuhkan infrastruktur fisik.

Place-based policy dapat membantu daerah dengan potential cluster, tetapi proyek harus mempertimbangkan market access, skill, dan comparative advantage.

Transfer fiskal tidak cukup bila daerah tidak memiliki administrative capacity. Capacity building dan accountability perlu.

Pemerataan spasial sebaiknya berarti network of productive places, bukan menyamakan semua daerah.

I. Social Protection as Productive Policy

Perlindungan sosial sering dianggap biaya konsumtif, padahal dapat meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan rumah tangga menghindari coping strategy seperti menarik anak dari sekolah, menjual aset, atau mengurangi gizi.

Unemployment protection serta active labor market policy membantu workers mengambil pekerjaan yang lebih sesuai skill daripada menerima pekerjaan pertama karena kebutuhan.

Social assistance yang terlalu cliff-like dapat mengurangi insentif formalitas bila manfaat hilang segera setelah pendapatan naik. Tapering dan dynamic eligibility lebih baik.

Digital payment serta data integration mempercepat respons, tetapi exclusion error dan privacy perlu dijaga.

Safety net yang kredibel juga dapat meningkatkan dukungan terhadap reformasi struktural.

J. Fiscal Policy and Inclusive Growth

Fiskal memengaruhi distribusi melalui pajak, transfer, layanan, dan investasi. Belanja pendidikan serta kesehatan memiliki efek jangka panjang yang berbeda dari subsidi harga.

Progressivity perlu dinilai secara keseluruhan. Pajak pendapatan dapat progresif, tetapi pajak konsumsi lebih luas. Pengeluaran publik dapat mengoreksi atau memperkuat distribusi.

Tax expenditure harus dievaluasi karena insentif yang tidak transparan dapat memberi manfaat besar kepada sektor atau kelompok tertentu.

Property tax dan capital income taxation memiliki potensi tetapi memerlukan administrasi data serta valuasi yang kuat.

Fiscal sustainability tetap penting karena utang tinggi dapat memindahkan beban ke generasi mendatang.

Kerangka Growth-to-Distribution Transmission

Saluran	Pertanyaan	Instrumen Utama	Indikator
Pekerjaan & Upah	Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan produktif?	Industri, skill, labor policy	Upah riil, formalitas
Usaha & Produktivitas	Apakah UMKM naik kelas?	Finance, digital, management	Sales/worker, exports
Aset	Apakah kepemilikan meluas?	Housing, pension, savings	Net assets
Layanan & Proteksi	Apakah biaya hidup efektif turun?	Health, education, social protection	Out-of-pocket, access
Wilayah	Apakah kesempatan menyebar?	Transfers, infrastructure, cities	Regional productivity

Lima Skenario Indonesia 2045

Skenario 1: Pertumbuhan Tinggi, Distribusi Lemah

PDB tumbuh melalui sektor capital-intensive dan aglomerasi besar, tetapi wage ladder sempit, housing mahal, serta daerah tertinggal. Kelas menengah rentan dan ketimpangan aset meningkat.

Skenario 2: Redistribusi Tinggi, Produktivitas Rendah

Transfer dan subsidi meluas tetapi job creation serta productivity tertinggal. Kemiskinan dapat turun sementara, namun basis fiskal serta mobilitas ekonomi lemah.

Skenario 3: Pemerataan Spasial tanpa Daya Saing

Proyek tersebar ke banyak daerah tetapi tidak berbasis cluster atau market. Infrastruktur underutilized dan biaya fiskal tinggi.

Skenario 4: Digitalisasi dengan Kesenjangan Skill

Perusahaan produktif mengadopsi AI dan otomatisasi, tetapi kelompok pekerja besar tertinggal. Wage inequality meningkat meski output tumbuh.

Skenario 5: Pertumbuhan Produktif dan Inklusif

Produktivitas, pekerjaan formal, human capital, aset, layanan publik, serta pusat pertumbuhan regional berkembang bersama. Ketimpangan kesempatan dan kerentanan menurun.

Balanced Scorecard Pertumbuhan dan Pemerataan

Perspektif	Tujuan	Indikator	Risiko
Pertumbuhan	Ekonomi ekspansif	PDB, produktivitas	Growth without jobs
Pekerjaan	Kualitas kerja naik	Formalitas, upah riil	Informality
Kemiskinan	Kerentanan turun	Poverty, transitions	Shock vulnerability
Ketimpangan	Distribusi membaik	Gini, bottom 40	Asset concentration
Layanan	Social wage naik	Health, education, transit	Quality gap
Aset	Kelas menengah lebih kuat	Housing, savings, pension	Debt stress
Wilayah	Peluang menyebar	PDRB/kapita, jobs	Enclave growth
Generasi	Mobilitas meningkat	Education/mobility	Inherited disadvantage

Peta Jalan Pemerataan 2026-2045

Tahap 1: Memperkuat Data Distribusi (2026-2028)

Bangun dashboard yang menggabungkan pertumbuhan, kemiskinan, near-poor, Gini, job quality, wage, housing cost, aset, dan spatial access. Gunakan data administratif serta survei dengan perlindungan privasi.

Tahap 2: Pekerjaan Produktif dan Formalisasi (2026-2030)

Perluas industrial upgrading, perusahaan menengah, apprenticeship, digital productivity, dan formalization incentive. Fokus pada sektor yang menyerap tenaga kerja dengan wage ladder.

Tahap 3: Universal Basic Services Berkualitas (2026-2032)

Tingkatkan kualitas sekolah, primary health, childcare, air, transportasi, dan digital connectivity sehingga social wage meningkat terutama bagi kelompok bawah dan menengah.

Tahap 4: Asset-Building dan Kelas Menengah (2027-2035)

Perkuat perumahan terjangkau dekat pekerjaan, pension coverage, savings, consumer protection, dan pembiayaan usaha produktif.

Tahap 5: Pemerataan Wilayah Produktif (2027-2038)

Bangun network kota tier-2, cluster daerah, universitas, logistics, supplier, dan fiscal equalization berbasis kebutuhan serta performance.

Tahap 6: Just Digital and Green Transition (2028-2040)

Reskilling pekerja, diversification daerah fosil, digital inclusion, AI governance, serta energi hijau dengan perlindungan kelompok rentan.

Tahap 7: Mobility Society 2045 (2035-2045)

Ukur keberhasilan dari kemampuan anak memperoleh peluang tidak terlalu ditentukan oleh latar keluarga atau lokasi. Fokus pada kualitas institusi, pendidikan, pasar kerja, dan kepemilikan aset.

Dua Belas Rekomendasi Prioritas

Pertama, menjadikan kualitas pekerjaan dan upah riil sebagai indikator utama selain pertumbuhan PDB.

Kedua, membangun dashboard near-poor dan vulnerability agar kebijakan tidak hanya berfokus pada garis kemiskinan.

Ketiga, memperluas industrial policy menuju job-rich productivity melalui supplier development, perusahaan menengah, dan sektor jasa modern.

Keempat, memperkuat universal basic services terutama sekolah, primary health, childcare, transportasi publik, air, dan internet.

Kelima, mengembangkan perumahan terjangkau yang terintegrasi dengan pusat pekerjaan serta transportasi, bukan perumahan murah yang terisolasi.

Keenam, memperkuat social protection adaptif dengan eligibility yang dinamis dan tapering yang tidak menghukum rumah tangga ketika pendapatan naik.

Ketujuh, melakukan review subsidi dan tax expenditure untuk menilai siapa yang menerima manfaat serta apakah kebijakan meningkatkan produktivitas.

Kedelapan, memperkuat pajak properti, administrasi aset, dan land value capture untuk membiayai layanan perkotaan serta perumahan.

Kesembilan, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mengarahkan transfer fiskal pada kualitas layanan serta pembangunan ekonomi lokal.

Kesepuluh, memastikan hilirisasi, transformasi digital, dan ekonomi hijau memiliki local linkage, reskilling, serta mekanisme just transition.

Kesebelas, memperluas kepemilikan aset melalui pension, savings, housing, dan pembiayaan usaha produktif dengan perlindungan konsumen.

Keduabelas, menerbitkan laporan tahunan Pertumbuhan dan Pemerataan Indonesia yang mengukur bukan hanya output tetapi transmisi pertumbuhan ke kesejahteraan.

Implikasi bagi Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

IBM ASMI dapat mengembangkan mata kuliah Inclusive Growth and Business Strategy yang menghubungkan makroekonomi, manajemen, ketimpangan, SDM, teknologi, dan sustainability.

Mahasiswa manajemen perlu memahami bahwa strategi perusahaan memiliki dampak distribusi melalui upah, kontrak kerja, supplier, lokasi, harga, data, dan akses layanan. Inclusive business bukan sekadar CSR.

PLS-SEM dapat digunakan untuk menguji pengaruh job quality, perceived fairness, dan financial security terhadap employee well-being serta productivity.

Riset UMKM dapat menilai apakah digital capability meningkatkan income stability melalui market access dan management quality.

Studi kelas menengah dapat mengukur pengaruh housing cost, debt burden, transport cost, dan education expenditure terhadap perceived economic security.

Business analytics lab dapat memetakan pertumbuhan regional, kemiskinan, Gini, employment, dan cost of living untuk mendukung kebijakan daerah.

Program executive education dapat melatih manajer mengenai living wage, supplier inclusion, reskilling, AI transition, dan shared value.

IBM ASMI juga dapat menjadi forum kebijakan antara bisnis, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk membahas bagaimana investasi menciptakan multiplier lokal.

Penelitian tentang ekonomi digital perlu memperluas ukuran dari GMV menuju produktivitas, pendapatan produsen, bargaining, dan formalization.

Agenda ini sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai lembaga yang tidak hanya mengembangkan kemampuan bisnis, tetapi juga kualitas pembangunan.

Glossarium

Pertumbuhan ekonomi: Kenaikan output barang dan jasa riil dalam suatu perekonomian.

Pemerataan: Distribusi kesempatan, pendapatan, aset, layanan, dan kemampuan yang lebih luas di masyarakat.

Pertumbuhan inklusif: Pertumbuhan yang memungkinkan partisipasi luas serta menyebarkan manfaat ekonomi secara substansial.

PDB: Produk Domestik Bruto, nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah negara.

PDB per kapita: PDB dibagi jumlah penduduk; indikator rata-rata, bukan distribusi.

Gini Ratio: Ukuran ketimpangan distribusi dengan nilai mendekati nol berarti lebih merata.

Kemiskinan: Kondisi ketika sumber daya rumah tangga berada di bawah standar minimum yang ditetapkan.

Kerentanan: Risiko rumah tangga jatuh miskin atau mengalami penurunan kesejahteraan akibat shock.

Near-poor: Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan rentan turun kembali.

Kelas menengah: Kelompok dengan tingkat konsumsi atau pendapatan di atas kerentanan dasar dan memiliki kapasitas konsumsi serta tabungan lebih besar.

Bottom 40 percent: Empat puluh persen penduduk pada bagian terbawah distribusi pendapatan atau pengeluaran.

Growth incidence curve: Grafik pertumbuhan pendapatan/konsumsi menurut posisi dalam distribusi.

Equality of opportunity: Prinsip bahwa peluang tidak seharusnya sangat ditentukan oleh kondisi lahir di luar kendali individu.

Mobilitas sosial: Perubahan posisi ekonomi atau sosial individu/rumah tangga sepanjang waktu atau antar-generasi.

Predistribution: Kebijakan yang membentuk distribusi pendapatan pasar sebelum pajak dan transfer.

Redistribution: Kebijakan pajak, transfer, dan layanan untuk mengubah distribusi setelah pasar.

Social wage: Nilai ekonomi layanan publik yang mengurangi kebutuhan pengeluaran rumah tangga.

Job quality: Kualitas pekerjaan yang mencakup upah, keamanan, jam kerja, perlindungan, dan prospek.

Formalitas: Status aktivitas ekonomi atau kerja yang terdaftar dan berada dalam sistem hukum/perlindungan.

Produktivitas tenaga kerja: Output per pekerja atau jam kerja.

Labor share: Bagian pendapatan ekonomi yang diterima tenaga kerja.

Missing middle: Kekurangan perusahaan skala menengah antara usaha mikro-kecil dan perusahaan besar.

Asset-building: Kebijakan yang membantu rumah tangga membangun tabungan, rumah, pensiun, atau aset usaha.

Land value capture: Mekanisme menangkap sebagian kenaikan nilai tanah akibat investasi atau keputusan publik.

Fiscal equalization: Transfer fiskal untuk mengurangi perbedaan kapasitas dan kebutuhan antarwilayah.

Place-based policy: Kebijakan yang disesuaikan dengan karakter serta potensi wilayah tertentu.

Agglomeration: Keuntungan produktivitas dari konsentrasi perusahaan, pekerja, dan jasa di suatu lokasi.

Just transition: Transisi ekonomi yang melindungi pekerja dan komunitas yang terdampak perubahan struktural.

Universal basic services: Akses luas terhadap layanan dasar bermutu seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, air, dan konektivitas.

Adaptive social protection: Perlindungan sosial yang dapat merespons shock dan perubahan kondisi rumah tangga.

Intergenerational mobility: Hubungan antara kondisi ekonomi orang tua dan hasil ekonomi anak.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488-1542.
<https://doi.org/10.1257/aer.20160696>

- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674287013>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2003). Inequality and growth: What can the data say? *Journal of Economic Growth*, 8, 267-299. <https://doi.org/10.1023/A:1026205114860>
- Bourguignon, F. (2004). *The poverty-growth-inequality triangle*. Indian Council for Research on International Economic Relations.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Fields, G. S. (2012). *Working hard, working poor*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794645.001.0001>
- Kanbur, R., & Venables, A. J. (Eds.). (2005). *Spatial inequality and development*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0199278636.001.0001>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Moretti, E. (2012). *The new geography of jobs*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). *Redistribution, inequality, and growth*. IMF Staff Discussion Note.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803-1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1-33.
<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.
- World Bank. (2016). *Indonesia's rising divide*. World Bank.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- World Bank. (2022). *Charting a course towards universal social protection*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1935-5>
- World Bank. (2023). *Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security*. World Bank.
- OECD. (2018). *A broken social elevator? How to promote social mobility*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264301085-en>
- OECD. (2021). *Does inequality matter?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3023ed40-en>
- OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- International Labour Organization. (2024). *World employment and social outlook*. ILO.

Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2026. BPS.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Catatan Data Mutakhir 2025-2026

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi daripada pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4.

Pada triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Struktur spasial tetap terkonsentrasi karena kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang sekitar 57,24 persen perekonomian pada periode tersebut.

Pada September 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perkotaan 6,60 persen, sedangkan perdesaan 10,72 persen, menandakan kesenjangan rural-urban yang masih penting.

Gini Ratio pengeluaran September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Pangsa pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen.

Data tersebut menunjukkan kemajuan simultan pada pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran. Namun analisis pemerataan perlu diteruskan ke kualitas pekerjaan, kekayaan, biaya hidup, akses layanan, dan mobilitas sosial yang tidak seluruhnya tercermin dalam indikator agregat.

Pendalaman Kebijakan: Dari Indikator menuju Transformasi Kesejahteraan

A. Kelas Menengah sebagai Penyangga Pembangunan

Kelas menengah penting karena membentuk basis konsumsi, tabungan, pajak, kewirausahaan, dan tuntutan terhadap layanan publik. Namun status kelas menengah harus dipahami sebagai tingkat keamanan ekonomi, bukan hanya posisi pada satu titik distribusi konsumsi.

Rumah tangga dapat berada di atas garis kemiskinan tetapi tetap rentan terhadap biaya kesehatan, kehilangan pekerjaan, bunga utang, atau kenaikan sewa. Karena itu, policy target perlu membedakan poor, vulnerable, aspiring middle class, dan secure middle class.

Penguatan kelas menengah memerlukan wage growth, housing affordability, pension, insurance, childcare, education quality, dan mobility. Transfer tunai saja tidak cukup.

Kelas menengah yang memiliki aset dan layanan publik yang dapat dipercaya lebih berani berinvestasi pada pendidikan, usaha, dan inovasi. Economic security dapat meningkatkan risk-taking produktif.

Kebijakan perlu menghindari situasi ketika rumah tangga memperoleh pendapatan lebih tinggi tetapi seluruh kenaikan terserap biaya kota, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

B. Strategi Pekerjaan Formal Produktif

Pemerataan paling berkelanjutan berasal dari pekerjaan yang meningkatkan produktivitas dan upah. Strategi penciptaan pekerjaan perlu menghubungkan industrial policy dengan labor market, pendidikan, dan wilayah.

Sektor manufaktur, construction berkualitas, logistics, health, education, digital services, tourism, agroprocessing, dan green economy memiliki pola penyerapan berbeda. Portfolio sektor lebih aman daripada bergantung pada satu mesin.

Formalization perlu memberi benefit nyata seperti social security, access finance, procurement, dan dispute resolution. Jika formalitas hanya menambah biaya, perusahaan akan menghindari.

Employment service dapat menghubungkan pencari kerja dan perusahaan serta memberi informasi skill shortage. Data lowongan merupakan signal penting bagi pendidikan.

Evaluasi kebijakan pekerjaan perlu mengukur retention, wage progression, training, dan transition dari informal ke formal, bukan hanya jumlah penempatan.

C. Produktivitas UMKM dan Jalan Naik Kelas

Sebagian besar usaha mikro memiliki fungsi livelihood, sementara sebagian memiliki potensi tumbuh. Kebijakan perlu membedakan keduanya agar sumber daya tidak disebar sama rata.

Growth-oriented SME membutuhkan management, finance, certification, machinery, digital system, market, dan talent. Supplier contract sering lebih efektif daripada pelatihan umum karena memberi demand nyata.

Digitalisasi UMKM perlu mengikuti maturity: pencatatan, pembayaran, inventory, procurement, CRM, accounting, lalu analytics. AI sebaiknya diterapkan ketika data serta proses sudah cukup.

Cluster serta koperasi dapat menyediakan shared logistics, laboratory, cold storage, packaging, dan software sehingga fixed cost dibagi.

Naiknya usaha mikro menjadi menengah memperbesar basis pajak, pekerjaan formal, dan local supplier. Missing middle adalah persoalan pemerataan sekaligus produktivitas.

D. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pemerataan

Ketimpangan kesempatan dimulai sebelum sekolah. Gizi, stimulasi, kesehatan ibu, lingkungan rumah, dan akses pendidikan anak usia dini memengaruhi kemampuan belajar.

Investasi pada early childhood memiliki horizon panjang tetapi return sosial tinggi karena mengurangi remedial cost dan memperbaiki schooling. Kebijakan ini sangat pro-equity karena keluarga kaya dapat membeli layanan privat sementara keluarga miskin tidak.

Kualitas caregiver dan parent engagement penting. Perluasan akses tanpa standar kualitas dapat menghasilkan dampak terbatas.

Childcare juga meningkatkan partisipasi kerja perempuan, menciptakan manfaat ekonomi ganda bagi anak dan orang tua.

Pemerataan generasi 2045 sangat ditentukan keputusan early childhood 2026-2030.

E. Reformasi Sekolah untuk Kesempatan yang Setara

Sekolah universal belum berarti kualitas universal. Gap antar sekolah, daerah, dan status sosial dapat membuat pendidikan mereproduksi ketimpangan.

Teacher deployment, leadership, assessment, curriculum, dan learning recovery perlu berorientasi hasil belajar. Infrastruktur penting tetapi bukan satu-satunya.

Digital education dapat membantu materi dan teacher support, tetapi perangkat tanpa pedagogi serta koneksi stabil tidak cukup.

Target pemerataan pendidikan perlu melihat learning gap, bukan hanya enrollment. Anak harus keluar sekolah dengan kemampuan yang memungkinkan mobility.

Affirmative support dapat diberikan pada sekolah dengan kondisi sulit melalui teacher incentive, coaching, dan resource tambahan.

F. Pendidikan Tinggi, Biaya, dan Mobilitas

Pendidikan tinggi memberikan peluang wage premium, tetapi biaya dan kualitas berbeda. Ekspansi tanpa kualitas dapat menghasilkan graduate underemployment.

Scholarship perlu diarahkan pada siswa berpotensi dari keluarga yang memiliki constraint finansial. Student finance harus menjaga risiko utang.

Perguruan tinggi daerah dapat menjadi anchor productivity melalui applied research, entrepreneurship, dan workforce development.

Program studi perlu lebih transparan tentang employment outcome agar mahasiswa membuat keputusan informed.

Mobility tidak hanya melalui gelar akademik. Diploma, professional certification, dan microcredential dapat menyediakan jalur lebih murah serta cepat.

G. Kesehatan Primer dan Ketimpangan Produktivitas

Primary care yang kuat mencegah penyakit, mengelola kondisi kronis, dan mengurangi kebutuhan rumah sakit mahal. Akses yang merata meningkatkan produktivitas pekerja serta kualitas hidup.

Out-of-pocket spending dapat mendorong rumah tangga rentan ke dalam kesulitan. Financial protection merupakan elemen pemerataan.

Distribusi tenaga kesehatan perlu dikelola dengan incentive, telemedicine, referral, dan fasilitas. Digital health dapat membantu tetapi tidak mengganti tenaga serta obat.

Preventive health seperti vaksinasi, screening, gizi, dan kesehatan lingkungan memiliki externality tinggi.

Data kesehatan perlu digunakan untuk mengidentifikasi gap layanan wilayah tanpa mengorbankan privacy.

H. Childcare dan Partisipasi Perempuan

Care responsibility menjadi salah satu penghalang utama partisipasi kerja perempuan. Childcare yang terjangkau dan berkualitas memungkinkan lebih banyak perempuan masuk pekerjaan formal serta mempertahankan karier.

Manfaat childcare melampaui tenaga kerja karena anak memperoleh stimulasi dan socialization. Standard kualitas serta keamanan penting.

Perusahaan dapat menyediakan atau mensubsidi childcare, tetapi kebijakan publik tetap perlu agar akses tidak hanya tersedia bagi pekerja perusahaan besar.

Parental leave yang seimbang mengurangi penalti karier perempuan dan mendorong pembagian care.

Peningkatan partisipasi perempuan memperluas talent pool dan pendapatan rumah tangga, sehingga menjadi agenda produktivitas dan pemerataan.

I. Perumahan sebagai Infrastruktur Kelas Menengah

Perumahan adalah konsumsi sekaligus aset. Ketersediaan rumah dekat pekerjaan menentukan biaya perjalanan, waktu, dan akses sekolah serta layanan.

Supply constraint di kota produktif dapat membuat housing cost naik lebih cepat daripada wage. Reformasi zoning, density, infrastructure, dan permitting dapat meningkatkan supply.

Subsidi sisi permintaan tanpa tambahan supply dapat mendorong harga. Kebijakan perlu seimbang antara finance dan pembangunan.

Rental housing penting bagi pekerja muda serta migran yang belum siap membeli rumah. Pasar sewa yang aman dan profesional memperluas mobility.

Public land dapat digunakan untuk mixed-income housing di lokasi strategis dengan governance transparan.

J. Transportasi Umum sebagai Kebijakan Redistribusi

Transportasi menentukan jumlah pekerjaan yang dapat dijangkau seseorang dalam satu jam. Dengan demikian, transit memiliki efek distribusi walaupun tidak disebut program sosial.

Tarif perlu terjangkau, tetapi reliability, frequency, safety, dan integration lebih menentukan penggunaan. Subsidi operasi dapat dibenarkan bila terdapat externality.

Integrasi land use mencegah stasiun hanya menjadi pemicu spekulasi tanah. Affordable housing di sekitar transit memperkuat inclusion.

Jaringan bus yang baik sering memberi manfaat cepat dengan investasi lebih rendah dibanding rail, sedangkan rail cocok pada koridor padat. Kombinasi moda penting.

Data mobility dapat membantu perencanaan tetapi privacy serta akses kelompok non-digital harus dijaga.

K. Pangan Murah tanpa Memiskinkan Petani

Kebijakan pangan menghadapi trade-off antara harga konsumen dan pendapatan produsen. Solusi jangka panjang adalah produktivitas, logistics, storage, competition, serta risk management.

Price control yang terlalu kaku dapat menurunkan supply atau kualitas. Stabilization buffer perlu transparan dan berbasis aturan.

Petani kecil memperoleh manfaat dari irrigation, seed, extension, mechanization service, crop insurance, dan market information.

Food loss reduction meningkatkan supply efektif tanpa membuka lahan baru. Cold chain, warehouse, dan processing menjadi bagian agenda.

Diversifikasi pangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas dan memperkuat nutrition.

L. Reformasi Subsidi untuk Pemerataan

Subsidi universal mudah diberikan tetapi sering menguntungkan kelompok yang mengonsumsi lebih banyak. Subsidi energi merupakan contoh ketika rumah tangga kaya dapat menerima nilai absolut lebih besar.

Reformasi subsidi perlu memperhitungkan inflation dan transport cost. Cash compensation serta peningkatan layanan publik dapat melindungi kelompok rentan.

Targeting tidak pernah sempurna. Universal price support mungkin tetap relevan pada kondisi tertentu, tetapi biaya kesempatan harus jelas.

Tax expenditure juga merupakan subsidi tersembunyi dan perlu dianalisis distribusinya.

Reformasi yang baik meningkatkan fiscal space untuk health, education, transit, housing, dan social protection yang lebih progresif.

M. Pajak dan Kontrak Sosial

Pajak tidak hanya sumber penerimaan tetapi bagian kontrak sosial. Kepatuhan meningkat ketika warga melihat fairness serta layanan yang setara.

Progressivity dapat ditingkatkan melalui administrasi pendapatan tinggi, capital income, property, dan closing loopholes tanpa menghambat investasi produktif.

Broad consumption tax efisien tetapi perlu diimbangi transfer atau layanan bagi kelompok bawah.

Local property tax memiliki potensi besar untuk membiayai layanan kota karena basisnya terkait nilai lokasi. Valuation dan cadastre harus diperkuat.

Tax policy perlu stabil serta mudah dipahami agar tidak meningkatkan uncertainty bagi usaha.

N. Transfer Fiskal dan Kualitas Daerah

Transfer fiskal mengurangi perbedaan revenue capacity, tetapi hasil akhir bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengubah anggaran menjadi layanan.

Formula perlu mempertimbangkan kebutuhan, biaya pelayanan, geografi, kemiskinan, dan kapasitas fiskal. Performance component dapat mendorong hasil tetapi jangan menghukum daerah yang memang berkapasitas rendah.

Capacity building perlu fokus procurement, planning, HR, data, maintenance, dan revenue administration.

Daerah terpencil memiliki unit cost lebih tinggi sehingga equal per-capita funding tidak selalu adil.

Benchmark layanan publik membantu warga dan pemerintah membandingkan outcome.

O. Kota Tier-2 sebagai Mesin Pemerataan

Kota metropolitan sangat produktif tetapi menghadapi kemacetan dan housing cost. Kota tier-2 dapat menjadi pusat pertumbuhan alternatif bila memiliki universitas, hospital, logistics, digital connectivity, dan quality urban management.

Investasi perlu memilih kota yang memiliki hinterland serta cluster potensial, bukan menyebar tanpa prioritas. Transport connection antar-kota memperluas labor market dan supplier network. Rail, road, port, dan aviation memiliki peran berbeda.

Quality of life penting untuk menarik professional dan entrepreneur. Air, sekolah, keamanan, ruang publik, serta budaya menjadi faktor ekonomi.

Digital services memungkinkan sebagian pekerjaan berlokasi di kota lebih kecil, tetapi talent serta ecosystem tetap.

Dua Puluh Lima Indikator Pemerataan yang Substantif

1. Pertumbuhan pendapatan atau konsumsi 40 persen terbawah.
2. Gini Ratio nasional, perkotaan, dan perdesaan.
3. Kemiskinan serta jumlah near-poor.
4. Mobilitas masuk-keluar kemiskinan.
5. Median real household income atau expenditure.
6. Pertumbuhan upah riil pekerja bawah dan menengah.
7. Proporsi pekerjaan formal.
8. Proporsi pekerja penuh waktu dengan perlindungan sosial.
9. Labor productivity menurut sektor dan wilayah.
10. Labor share pada sektor utama.
11. Persentase UMKM yang naik kelas menjadi menengah.
12. Kepemilikan rumah dan beban biaya perumahan.
13. Coverage pensiun dan tabungan jangka panjang.
14. Out-of-pocket health expenditure rumah tangga.
15. Learning outcome menurut kuintil dan wilayah.
16. Partisipasi PAUD berkualitas.
17. Waktu perjalanan rumah-pekerjaan.
18. Akses transportasi umum berkualitas.
19. Partisipasi kerja perempuan.
20. Youth NEET atau transisi sekolah-kerja.
21. PDRB per kapita dan produktivitas antarprovinsi.

22. Kualitas layanan dasar pemerintah daerah.
23. Proporsi investasi luar Jawa dengan linkage lokal.
24. Akses digital produktif bagi UMKM dan rumah tangga.
25. Intergenerational mobility dalam pendidikan dan pendapatan.

Agenda Seratus Hari untuk Memperkuat Pemerataan

1. Membentuk dashboard nasional Growth-to-Distribution Transmission.
2. Menetapkan baseline upah riil, formalitas, near-poor, housing cost, dan transport cost.
3. Memilih sepuluh kota untuk audit akses pekerjaan melalui transportasi serta perumahan.
4. Meninjau lima subsidi atau tax expenditure terbesar dari sisi distribusi.
5. Mengembangkan pilot adaptive social protection yang merespons shock lokal.
6. Memetakan perusahaan menengah potensial untuk supplier development.
7. Memilih lima cluster hilirisasi untuk target local jobs dan local supplier.
8. Mengembangkan indikator quality of jobs dalam evaluasi investasi.
9. Membuka program childcare pilot di kawasan industri dan pusat kerja.
10. Menetapkan dashboard kualitas sekolah dan primary health antarwilayah.
11. Memperkuat housing data dan land value pada kota besar.
12. Membentuk program kota tier-2 produktif dengan indikator pekerjaan serta layanan.
13. Mengintegrasikan reskilling pada proyek AI, otomasi, dan energi hijau.
14. Menetapkan mekanisme citizen feedback untuk kualitas layanan dasar.
15. Menerbitkan laporan triwulanan ringkas tentang pertumbuhan, kemiskinan, Gini, pekerjaan, dan daya beli.

Dua Belas Prinsip Pertumbuhan yang Merata

1. Pertumbuhan Harus Menciptakan Kesempatan

Output yang naik harus membuka jalur pekerjaan, usaha, dan aset. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

2. Produktivitas dan Upah Harus Bergerak Bersama

Wage growth yang sehat membutuhkan productivity sekaligus fairness. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

3. Layanan Publik adalah Pendapatan Sosial

Kualitas health, education, transit, water, dan internet menentukan kesejahteraan riil. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

4. Lindungi yang Rentan, Dorong yang Mampu Naik

Safety net dan mobility policy harus berjalan bersama. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

5. Ukur Kekayaan, Bukan Pendapatan Saja

Aset menentukan ketahanan serta mobilitas. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

6. Formalisasi Harus Memberi Manfaat

Compliance perlu dibalas access dan protection. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

7. Kota Produktif Harus Tetap Terjangkau

Housing dan transit menjaga akses kelompok menengah-bawah. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

8. Daerah Membutuhkan Ekosistem, Bukan Proyek Tunggal

Skill, supplier, layanan, dan institusi menciptakan multiplier. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

9. Teknologi Harus Memperluas, Bukan Mempersempit Kesempatan

Digital dan AI perlu reskilling serta access. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

10. Transisi Hijau Harus Adil

Pekerja dan daerah terdampak memerlukan jalur baru. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

11. Pajak dan Subsidi Harus Transparan Distribusinya

Siapa membayar dan siapa menerima perlu terlihat. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

12. Evaluasi Harus Melihat Mobilitas

Keberhasilan tertinggi adalah peluang hidup yang makin tidak ditentukan asal. Prinsip ini dapat menjadi filter sederhana bagi kebijakan pembangunan, investasi, dan anggaran.

Kesimpulan Menyeluruh

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap merupakan modal penting. Tanpa pertumbuhan, ruang bagi kenaikan pendapatan, investasi publik, dan penyerapan tenaga kerja menjadi sempit. Namun pertumbuhan yang tidak memiliki saluran distribusi kuat akan menghasilkan kemajuan yang dirasakan tidak merata.

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran bergerak ke arah positif. Tantangan berikut adalah memperdalam kualitas kemajuan tersebut agar rumah tangga tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi menjadi lebih aman dan mampu membangun aset.

Pemerataan bukan proyek membagi hasil setelah ekonomi tumbuh. Ia dimulai dari struktur kesempatan: siapa memperoleh pendidikan, siapa masuk pekerjaan produktif, siapa memiliki rumah dan tabungan, siapa dapat pindah ke kota produktif, serta siapa memperoleh akses modal.

Pekerjaan merupakan saluran paling penting karena mayoritas rumah tangga memperoleh pendapatan utama dari kerja. Karena itu, strategi pembangunan perlu mengejar job-rich productivity, bukan sekadar investasi yang capital-intensive.

UMKM perlu dibantu bukan hanya bertahan, tetapi sebagian perlu naik kelas. Perusahaan menengah memperkuat rantai nilai, menyerap tenaga teknis, dan menciptakan mobility bagi entrepreneur.

Human capital menentukan apakah pertumbuhan modern berbasis teknologi akan mempersempit atau memperluas peluang. Early childhood, sekolah, vokasi, kesehatan, dan lifelong learning harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi.

Layanan publik berkualitas adalah bentuk redistribusi yang sangat kuat karena menurunkan biaya hidup tanpa selalu menambah transfer uang. Transportasi, perumahan, health, dan education menentukan pendapatan efektif kelas bawah serta menengah.

Kelas menengah yang kuat membutuhkan lebih dari konsumsi. Mereka memerlukan aset, pension, housing, pekerjaan stabil, dan perlindungan dari shock. Economic security adalah fondasi bagi investasi keluarga serta entrepreneurship.

Ketimpangan wilayah tidak diselesaikan dengan memindahkan satu pabrik. Daerah membutuhkan ekosistem talenta, supplier, kota, universitas, konektivitas, dan pemerintah yang mampu.

Hilirisasi dapat memperluas pemerataan bila local linkage dirancang. Jika hanya pabrik besar dengan input serta tenaga dari luar, multiplier lokal terbatas.

Transformasi digital dapat menurunkan biaya dan membuka pasar, tetapi juga dapat memperkuat market concentration serta skill premium. Digital policy harus memasukkan competition, interoperability, reskilling, dan inclusion.

AI akan mengubah banyak tugas. Respons terbaik bukan menghambat teknologi, tetapi membantu pekerja dan perusahaan bergerak ke aktivitas baru melalui training, mobility, dan social protection.

Ekonomi hijau menciptakan peluang industrialisasi baru, tetapi daerah fosil serta pekerja lama tidak boleh ditinggalkan. Just transition adalah bagian pemerataan.

Fiskal perlu mendukung produktivitas sekaligus fairness. Pajak, subsidi, transfer, dan public investment harus dinilai dari dampak distribusi dan opportunity.

Desentralisasi memungkinkan solusi lokal, tetapi kapasitas daerah berbeda. Equalization harus disertai dukungan institusi dan accountability.

Perumahan merupakan salah satu isu kelas menengah paling strategis karena terkait aset, biaya hidup, mobility, dan akses kerja. Housing policy yang terpisah dari transportasi akan gagal.

Transportasi umum adalah kebijakan pemerataan karena memperluas job access bagi mereka yang tidak memiliki mobil. Nilainya lebih besar daripada sekadar pengurangan kemacetan.

Pangan tetap sangat sensitif bagi kelompok bawah. Stabilitas harga yang berkelanjutan membutuhkan productivity petani, logistics, storage, dan competition, bukan hanya intervensi jangka pendek.

Pemerataan aset perlu menjadi agenda baru. Pensiun, tabungan, rumah, serta usaha memberi household resilience dan mengurangi ketergantungan pada transfer.

Pengukuran kemajuan juga perlu berkembang. Gini serta kemiskinan tetap penting, tetapi dashboard harus mencakup median income, upah riil, job quality, housing burden, learning, health cost, asset, dan mobility.

Indonesia menuju 2045 perlu membangun mobility society, yaitu masyarakat di mana masa depan anak tidak terlalu ditentukan oleh lokasi lahir, status keluarga, atau jaringan. Ini adalah bentuk pemerataan paling dalam.

Pertumbuhan dan pemerataan bukan musuh. Ketika lebih banyak anak sehat dan terdidik, lebih banyak usaha produktif, dan lebih banyak pekerja memperoleh skill, kapasitas pertumbuhan justru meningkat.

Ketika kelas menengah merasa aman, konsumsi dan investasi lebih stabil. Ketika daerah memiliki basis produktif, tekanan migrasi dan ketimpangan politik berkurang.

Ketika layanan publik dipercaya, kontrak sosial membaik dan kepatuhan pajak dapat meningkat. Pemerataan memiliki efek institusional yang memperkuat negara.

Karena itu, agenda peningkatan ekonomi Indonesia seharusnya bergerak dari pertanyaan 'berapa cepat ekonomi tumbuh?' menuju 'berapa banyak orang yang memperoleh kemampuan baru karena pertumbuhan tersebut?'.

Pertanyaan kedua lebih sulit diukur, tetapi lebih dekat dengan tujuan pembangunan. Ia memaksa pemerintah dan bisnis melihat pekerjaan, skill, aset, layanan, wilayah, dan generasi.

Pertumbuhan yang baik memperbesar kue; pemerataan yang baik memperluas kemampuan masyarakat untuk ikut membuat kue yang lebih besar berikutnya. Hubungan ini bersifat dinamis, bukan zero-sum.

Dengan strategi yang menggabungkan produktivitas, pekerjaan, human capital, asset-building, universal basic services, dan wilayah, Indonesia dapat mengejar pendapatan tinggi tanpa meninggalkan kohesi sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan hanya ketika rata-rata pendapatan naik, tetapi ketika semakin sedikit orang terjebak oleh kondisi kelahiran, semakin banyak yang dapat berpindah ke pekerjaan lebih baik, dan semakin luas masyarakat memiliki aset serta rasa aman.

Itulah makna pergeseran dari pertumbuhan ke pemerataan: bukan meninggalkan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan menjadi mesin perluasan kesempatan dan kesejahteraan bersama.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan pada Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Data mutakhir yang digunakan mengacu pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik yang tersedia hingga Agustus 2026.

Pendalaman Lanjutan: Pemerataan sebagai Arsitektur Pertumbuhan

A. Mengapa Pemerataan Dapat Memperkuat Pertumbuhan

Perdebatan lama sering menempatkan pertumbuhan dan pemerataan sebagai trade-off: kebijakan terlalu redistributif dianggap mengurangi insentif investasi, sedangkan pertumbuhan tinggi dianggap perlu dibiarkan menghasilkan ketimpangan sementara. Literatur modern menunjukkan hubungan lebih kompleks. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat mengurangi investasi human capital, memperlemah demand, meningkatkan ketidakstabilan politik, serta menutup peluang bagi talenta yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pemerataan yang mendukung produktivitas berbeda dari redistribusi yang hanya memindahkan pendapatan tanpa meningkatkan kemampuan. Pendidikan, kesehatan, childcare, transportasi, housing, dan access finance memberi rumah tangga kemampuan berpartisipasi dalam ekonomi modern.

Pasar domestik yang luas dan memiliki daya beli juga memberi scale bagi industri. Ketika peningkatan pendapatan tersebar, demand terhadap barang dan jasa menengah dapat menopang industrial upgrading.

Kohesi sosial merupakan aset ekonomi. Negara yang mampu mengelola perubahan struktural dengan rasa fairness lebih mudah menjalankan reformasi sulit seperti subsidy reform, tax reform, energy transition, dan digitalization.

Dengan demikian, pemerataan yang dirancang produktif bukan penghambat pertumbuhan, melainkan salah satu fondasinya.

B. Median versus Average

Rata-rata pendapatan dapat meningkat meskipun sebagian besar rumah tangga mengalami kenaikan yang jauh lebih kecil jika kelompok atas memperoleh pertumbuhan sangat tinggi. Karena itu, median menjadi pelengkap penting untuk membaca pengalaman rumah tangga 'tipikal'.

Perbedaan antara mean dan median juga relevan pada harga rumah, upah, serta aset. Average sering sensitif terhadap nilai ekstrem.

Dashboard ekonomi sebaiknya menunjukkan GDP per capita, median household expenditure, median wage, dan distribution by decile. Hal ini memperkaya komunikasi publik tentang siapa yang mengalami kemajuan.

Median real income yang stagnan di tengah pertumbuhan dapat menjadi tanda weak transmission melalui pasar kerja atau cost of living.

Penggunaan indikator median tidak mengganti PDB, tetapi mengurangi risiko menyamakan kemajuan agregat dengan pengalaman mayoritas.

C. Ketimpangan Kekayaan dan Warisan

Kekayaan lebih persisten daripada pendapatan karena aset dapat diwariskan dan menghasilkan return. Rumah tangga pemilik tanah, rumah, saham, atau bisnis menikmati capital gain, sedangkan rumah tangga tanpa aset hanya mengandalkan upah.

Ketimpangan kekayaan memengaruhi akses pendidikan, entrepreneurship, lokasi tempat tinggal, dan kemampuan menanggung periode tanpa pendapatan. Karena itu, mobilitas tidak hanya bergantung skill.

Administrasi aset yang lebih baik diperlukan untuk memahami distribusi tanah, properti, pension, dan financial wealth. Data privasi harus dijaga, tetapi statistik agregat sangat penting.

Estate atau inheritance policy merupakan isu sensitif dan harus disesuaikan kapasitas administrasi. Alternatif pemerataan aset dapat melalui housing, pension, employee ownership, serta matched savings.

Tujuan bukan menghukum akumulasi kekayaan produktif, tetapi memperluas kesempatan membangun aset.

D. Utang Rumah Tangga dan Kerentanan Kelas Menengah

Access credit dapat meningkatkan kesejahteraan melalui rumah, pendidikan, dan usaha, tetapi debt service yang tinggi mengurangi ruang konsumsi serta ketahanan shock. Digital lending memperluas akses sekaligus risiko over-borrowing.

Indikator kelas menengah perlu melihat debt-to-income, debt service ratio, tenor, serta purpose. Utang produktif berbeda dari revolving consumption debt.

Consumer protection, affordability assessment, transparent pricing, dan credit reporting membantu mencegah debt trap. Financial literacy saja tidak cukup jika product design buruk.

Rumah tangga dengan pendapatan naik tetapi hutang lebih cepat tumbuh dapat terlihat sejahtera dalam konsumsi jangka pendek dan rapuh dalam jangka panjang.

Macroprudential dan micro consumer protection perlu berjalan bersama untuk menjaga financial inclusion tetap sehat.

E. Inflasi Menurut Kelompok Pendapatan

Inflasi headline menggambarkan perubahan harga rata-rata basket, tetapi rumah tangga berbeda memiliki pola konsumsi berbeda. Kelompok bawah mengalokasikan porsi lebih besar untuk pangan serta energi sehingga inflation experience dapat berbeda.

Inflasi pangan yang tinggi dapat menghapus manfaat kenaikan pendapatan kelompok bawah lebih cepat daripada kelompok atas. Karena itu, real income distribution perlu menggunakan price index yang relevan.

Transportasi dan housing juga memberikan tekanan berbeda di kota. Kelas menengah urban sering memiliki fixed cost tinggi yang tidak tampak pada garis kemiskinan.

Distribution-sensitive inflation analysis dapat membantu menentukan compensation saat reformasi harga atau shock global.

Tujuan kebijakan tetap price stability secara umum, tetapi komunikasi dan mitigasi perlu memahami heterogenitas rumah tangga.

F. Ekonomi Perawatan dan Pemerataan

Care economy mencakup pengasuhan anak, lansia, disabilitas, serta pekerjaan rumah tangga yang banyak dilakukan tanpa bayaran. Beban care memengaruhi partisipasi kerja, terutama perempuan.

Investasi childcare serta eldercare menciptakan pekerjaan sekaligus membebaskan waktu anggota keluarga untuk aktivitas berbayar. Ini adalah sektor produktif meski outputnya tidak selalu terlihat seperti manufaktur.

Profesionalisasi care work perlu meningkatkan standar, training, dan wage. Jika layanan murah bergantung pada pekerja berupah sangat rendah, pemerataan hanya dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lain.

Ageing population membuat care economy semakin penting. Sistem perlu berkembang sebelum dependency ratio meningkat lebih jauh.

Care infrastructure sama pentingnya dengan transport infrastructure bagi labor supply.

G. Kepemilikan Pekerja dan Profit Sharing

Perusahaan dapat berbagi hasil produktivitas melalui bonus, profit sharing, employee stock ownership, atau pension contribution. Mekanisme ini memperluas capital income bagi pekerja.

Profit sharing membantu mengaitkan compensation dengan kemampuan perusahaan, tetapi desain harus menghindari substitusi terhadap wage floor.

Employee ownership juga dapat meningkatkan engagement dan wealth, meski konsentrasi kekayaan pada saham employer menimbulkan risiko. Diversification melalui pension fund penting.

Tax treatment dapat mendorong program yang inklusif dan tidak hanya bagi eksekutif.

Pendekatan ini memperluas predistribution dengan mengubah siapa yang memperoleh return dari pertumbuhan perusahaan.

H. Persaingan Pasar dan Ketimpangan

Market power memungkinkan perusahaan menaikkan markup serta menekan wage atau supplier margin. Konsentrasi pasar dapat menjadi saluran ketimpangan bila rente terkumpul pada pemilik capital.

Competition policy memiliki dimensi pemerataan karena harga lebih rendah meningkatkan daya beli konsumen dan akses pasar supplier.

Digital platform memerlukan perhatian karena network effects dapat menghasilkan winner-take-most. Interoperability dan portability membantu contestability.

Namun scale juga dapat meningkatkan efisiensi. Kebijakan perlu membedakan keberhasilan karena innovation dari dominance yang dipertahankan melalui exclusion.

Pasar yang kompetitif membantu memastikan productivity gain diteruskan lebih luas.

I. Public Procurement dan Inklusi

Belanja pemerintah dapat menciptakan demand bagi perusahaan lokal dan kelompok usaha yang kurang terwakili. Namun quota semata dapat menurunkan quality bila tidak disertai capability building.

Supplier readiness, e-procurement, payment discipline, dan contract size menentukan apakah UMKM dapat ikut. Paket terlalu besar otomatis mengecualikan banyak perusahaan.

Prompt payment sangat penting bagi perusahaan kecil yang memiliki working capital terbatas. Keterlambatan pemerintah dapat menjadi regresif.

Procurement dapat mendorong apprenticeship, local job, green standard, dan innovation jika criteria dirancang jelas.

Tujuan inclusion perlu diimbangi value for money serta competition.

J. Infrastruktur Digital sebagai Social Infrastructure

Internet berkecepatan memadai semakin menentukan akses kerja, pendidikan, layanan publik, dan usaha. Digital connectivity memiliki karakter social infrastructure.

Namun coverage tidak sama dengan meaningful access. Harga perangkat, data, literacy, serta kualitas jaringan menentukan penggunaan produktif.

Public access point, school connectivity, community digital center, dan shared devices dapat membantu wilayah atau keluarga rentan.

Digital identity dan payment memperkuat layanan, tetapi exclusion harus dicegah bagi warga tanpa perangkat atau literacy.

Transformasi digital yang inklusif menyediakan alternatif non-digital pada masa transisi dan memastikan hak tidak bergantung pada smartphone.

K. AI dan Distribusi Pendapatan

AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja tertentu dan menggantikan tugas lain. Dampak distribusi bergantung apakah AI terutama complement atau substitute terhadap labor.

Pekerja dengan kemampuan menggunakan AI mungkin memperoleh wage premium, sehingga diffusion skill menjadi penting. Jika hanya perusahaan besar memiliki akses, productivity gap antarperusahaan melebar.

AI dapat pula membantu UMKM melalui accounting, marketing, design, customer service, dan coding dengan biaya rendah. Program literacy dan trusted tools dapat memperluas manfaat.

Tax system tidak perlu menghukum teknologi secara spesifik, tetapi social insurance serta lifelong learning harus mampu menghadapi perubahan job task.

Evaluasi AI policy sebaiknya mencakup productivity, wage, job transition, dan concentration, bukan hanya adoption.

L. Ekonomi Hijau dan Distribusi Biaya

Carbon pricing, energy transition, dan environmental standard dapat menaikkan biaya pada tahap awal. Kelompok bawah dapat terdampak lebih besar jika energi serta transportasi merupakan porsi besar pengeluaran.

Revenue recycling dapat mengubah carbon price menjadi progresif melalui cash transfer, public transit, atau energy efficiency bagi rumah tangga bawah.

Program efficiency rumah dan kendaraan sering lebih mudah diakses rumah tangga kaya karena membutuhkan investasi awal. Financing serta targeted support perlu.

Green jobs tidak otomatis berada di daerah atau pekerja yang kehilangan pekerjaan lama. Spatial serta skill mismatch perlu diatasi.

Just transition membuat kebijakan iklim lebih durable secara politik.

M. Ketimpangan Lingkungan

Kelompok miskin sering tinggal di lokasi lebih rentan banjir, polusi, atau panas karena harga tanah lebih rendah. Environmental inequality menambah beban pada ketimpangan ekonomi.

Adaptation investment seperti drainage, green space, safe housing, dan heat management memiliki efek distribusi.

Relocation perlu menjaga livelihood dan social network. Memindahkan warga jauh dari pekerjaan dapat memperburuk welfare meski risiko fisik turun.

Data hazard perlu digabung dengan data sosial untuk prioritas investasi.

Clean air serta safe water merupakan universal basic services yang memiliki manfaat kesehatan dan produktivitas.

N. Migrasi Internal dan Mobilitas Ekonomi

Migrasi dari daerah berproduktivitas rendah ke pusat ekonomi dapat meningkatkan pendapatan. Kebijakan yang terlalu membatasi mobility dapat mempertahankan spatial inequality.

Namun migran menghadapi housing, dokumentasi, sekolah, health, dan network constraint. Portability layanan sosial membantu.

Kota penerima perlu membangun housing serta transport supply agar inflow pekerja tidak memperburuk slum dan congestion.

Remittance dapat membantu daerah asal, tetapi brain drain juga mungkin. Hubungan ekonomi antarwilayah perlu diperkuat.

Mobility policy berarti membuat perpindahan pilihan yang aman, bukan memaksa orang meninggalkan daerah.

O. Ketahanan Pekerjaan pada Masa Krisis

Pandemi dan shock ekonomi menunjukkan pentingnya mekanisme mempertahankan employment relationship. Wage subsidy atau short-time work dapat mencegah pemutusan massal ketika shock bersifat sementara.

Unemployment insurance memberikan income smoothing, tetapi coverage informal rendah. Sistem perlu bertahap dan terintegrasi dengan job search support.

Portable benefits penting ketika pekerja sering berpindah employer atau bekerja gig. Perlindungan sebaiknya melekat pada individu, bukan sepenuhnya pada kontrak.

Emergency social protection perlu memiliki trigger berbasis data dan mekanisme pembayaran yang siap sebelum krisis.

Resilience adalah bagian pemerataan karena rumah tangga bawah memiliki buffer lebih kecil.

Matriks Kebijakan Pemerataan

Masalah	Saluran	Kebijakan	Ukuran Hasil
Upah stagnan	Pasar kerja	Produktivitas, skill, bargaining	Upah riil median
UMKM tidak naik kelas	Produktivitas usaha	Finance, management, supplier	Sales/worker
Housing mahal	Aset & biaya hidup	Supply, transit, rental	Housing burden
Gap daerah	Spasial	Cluster, transfers, city network	PDRB/job gap
Shock rumah tangga	Proteksi	Adaptive social protection	Poverty transitions
Skill digital	Teknologi	Training, shared access	Wage/productivity

Agenda Penelitian untuk IBM ASMI

1. Mengukur hubungan kualitas pekerjaan, financial security, dan subjective well-being pekerja Indonesia.
2. Menguji pengaruh digital capability UMKM terhadap income stability dengan management quality sebagai mediator.
3. Menganalisis housing cost burden kelas menengah di kota metropolitan dan implikasinya terhadap saving.
4. Menguji pengaruh transport accessibility terhadap job opportunity dan employee retention.
5. Mengembangkan Inclusive Growth Index tingkat provinsi yang menggabungkan PDRB, job quality, poverty, Gini, health, education, dan housing.
6. Menggunakan PLS-SEM untuk menguji perceived fairness, career opportunity, dan wage adequacy terhadap organizational commitment.
7. Menganalisis pengaruh childcare availability terhadap labor force participation perempuan pada rumah tangga urban.
8. Menguji hubungan AI adoption dengan productivity dan wage premium pada perusahaan menengah.
9. Menganalisis local linkage proyek hilirisasi dan dampaknya terhadap supplier serta income daerah.
10. Mengembangkan model social mobility berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan aset keluarga.
11. Mengukur vulnerability kelas menengah dengan indikator income volatility, debt service, housing, dan health shock.
12. Menganalisis distributional impact subsidi energi dan skenario reformasi.
13. Mengembangkan dashboard harga pangan dan real purchasing power menurut kelompok pendapatan.
14. Mempelajari missing middle melalui panel perusahaan untuk memahami mengapa usaha tidak scale.
15. Menganalisis role of management practices terhadap productivity gap dan wage gap antarperusahaan.

Epilog: Pemerataan sebagai Kemampuan untuk Maju

Pemerataan yang paling kuat bukanlah ketika setiap rumah tangga menerima jumlah bantuan yang sama, melainkan ketika semakin banyak rumah tangga memiliki kapasitas untuk memperoleh pendapatan, membangun aset, dan menghadapi shock tanpa kehilangan masa depan.

Hal itu membutuhkan negara yang mampu menyediakan layanan dasar bermutu, pasar yang kompetitif, perusahaan yang produktif, serta institusi yang memberi ruang bagi mobilitas.

Pertumbuhan tetap mesin penting karena tanpa ekspansi ekonomi, peluang baru sulit tercipta. Namun mesin membutuhkan transmisi. Pekerjaan, upah, usaha, aset, layanan, dan wilayah adalah sistem transmisi yang mengubah output menjadi kesejahteraan.

Jika transmisi lemah, angka PDB dapat bergerak jauh lebih cepat daripada pengalaman rumah tangga. Ketidakpuasan kemudian bukan paradoks, tetapi konsekuensi desain.

Indonesia memiliki kesempatan memperbaiki transmisi tersebut pada saat ekonomi masih tumbuh, kemiskinan menurun, dan ketimpangan pengeluaran menunjukkan perbaikan. Momentum positif lebih mudah digunakan untuk reformasi daripada masa krisis.

Pemerataan juga perlu bergerak dari pendekatan defensif menuju ofensif. Selain melindungi yang miskin, kebijakan harus membantu yang rentan menjadi aman, yang kecil menjadi produktif, yang muda memperoleh skill, dan daerah yang tertinggal membangun pusat ekonomi.

Kelas menengah yang luas tidak lahir hanya dari transfer. Ia tumbuh dari pekerjaan formal, wage ladder, housing, pension, education, health, dan usaha yang bisa berkembang.

Pada tingkat perusahaan, inclusive growth berarti membangun hubungan produktif dengan pekerja dan supplier. Upah, training, safety, prompt payment, dan teknologi menentukan distribusi nilai.

Pada tingkat kota, inclusive growth berarti orang dapat tinggal cukup dekat dengan pekerjaan, menggunakan transportasi yang andal, dan mengakses sekolah serta layanan tanpa biaya berlebihan.

Pada tingkat nasional, inclusive growth berarti tempat lahir tidak menjadi penentu dominan masa depan. Anak dari desa, kota kecil, atau keluarga sederhana tetap memiliki jalur menuju pendidikan dan pekerjaan berkualitas.

Indonesia 2045 membutuhkan masyarakat yang bukan hanya lebih kaya secara rata-rata, tetapi lebih mobile dan lebih aman. Mobilitas memberikan harapan; keamanan memberi keberanian mengambil risiko produktif.

Ketika kedua unsur itu tersedia, masyarakat lebih mampu menerima perubahan teknologi dan ekonomi karena mereka memiliki jalur untuk beradaptasi.

Pemerataan dengan demikian tidak menghapus kompetisi, melainkan membuat lebih banyak orang mampu berkompetisi.

Ia tidak menolak reward bagi inovasi, tetapi memastikan pendidikan, modal, data, dan pasar tidak hanya tersedia bagi kelompok yang sudah unggul.

Ia tidak menolak aglomerasi, tetapi membangun koneksi serta pusat pertumbuhan lain agar keuntungan lokasi tidak menjadi penghalang permanen.

Ia tidak menolak teknologi, tetapi memastikan reskilling dan social protection berjalan seiring.

Ia tidak menolak pasar, tetapi memastikan market power, information asymmetry, dan externality tidak mengubah pasar menjadi mesin konsentrasi.

Ia tidak mengganti growth agenda, tetapi memperbaiki arsitektur pertumbuhan agar output, produktivitas, dan kemampuan sosial saling memperkuat.

Agenda ini memerlukan horizon panjang. Banyak hasil pendidikan, perumahan, urban planning, dan asset-building baru terlihat satu dekade atau lebih.

Karena itu, konsistensi lintas pemerintahan menjadi penting. Tujuan pemerataan harus stabil sementara instrumen dapat disesuaikan berdasarkan bukti.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pembangunan dari pengalaman nyata: apakah pekerjaan lebih baik, biaya hidup lebih terkendali, anak memperoleh peluang, layanan dapat dipercaya, dan masa depan terasa lebih aman.

Ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin positif, pertumbuhan tidak lagi tampak sebagai statistik jauh dari kehidupan sehari-hari.

Pertumbuhan telah berubah menjadi pemerataan kesempatan, pemerataan kemampuan, dan pemerataan rasa aman.

Itulah agenda peningkatan ekonomi Indonesia yang lebih lengkap: tumbuh lebih cepat bila memungkinkan, tetapi selalu memastikan semakin banyak warga memiliki kemampuan untuk ikut tumbuh.

Suplemen Strategis: Pemerataan Produktif untuk Indonesia Emas 2045

A. Pemerataan dalam Kebijakan Investasi

Investasi sering dipandang terutama dari nilai modal masuk, kapasitas produksi, dan potensi ekspor. Perspektif pemerataan menambahkan pertanyaan mengenai struktur manfaat: berapa pekerjaan lokal tercipta, keterampilan apa yang dibangun, supplier mana yang tumbuh, bagaimana pendapatan daerah digunakan, dan apakah biaya lingkungan atau perumahan ditanggung komunitas sekitar.

Kebijakan investasi dapat memasukkan local economic development plan yang realistis, bukan kewajiban lokal yang terlalu tinggi sejak awal. Investor dapat bekerja dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menyusun peta skill, supplier, serta kebutuhan infrastruktur.

Aftercare investment penting untuk memperdalam linkage setelah proyek berjalan. Banyak peluang supplier baru muncul setelah perusahaan memahami operasi lokal. Pemerintah tidak seharusnya berhenti pada penerbitan izin.

Data mengenai wage, local procurement, training, dan supplier dapat dikumpulkan secara agregat sebagai evaluasi dampak. Transparansi membantu publik melihat apakah investasi menghasilkan multiplier.

Pemerataan investasi bukan berarti semua daerah harus mendapat jumlah proyek sama, tetapi setiap daerah perlu memiliki jalan yang masuk akal menuju basis produktif sesuai aset, lokasi, dan kemampuan.

B. Pembangunan Infrastruktur yang Pro-Pemerataan

Infrastruktur mengubah akses pasar serta nilai tanah. Jalan, pelabuhan, rel, internet, air, dan listrik dapat meningkatkan produktivitas, tetapi distribusi manfaat bergantung lokasi dan pricing.

Cost-benefit analysis perlu memasukkan distributional effect. Proyek yang menghemat waktu bagi jutaan pengguna berpendapatan menengah-bawah dapat memberi manfaat sosial tinggi meski toll revenue rendah.

Maintenance harus mendapat perhatian karena infrastruktur yang cepat rusak merugikan daerah dan kelompok yang tidak memiliki alternatif. Anggaran pembangunan baru yang mengabaikan pemeliharaan menciptakan ketidakadilan antargenerasi.

Land acquisition perlu fair serta mempertimbangkan livelihood, bukan hanya nilai aset fisik. Relocation yang memutus akses kerja dapat menurunkan kesejahteraan.

Infrastruktur digital dan fisik perlu dirancang sebagai jaringan. Jalan tanpa logistics system atau broadband tanpa skill menghasilkan efek terbatas.

C. Reformasi Birokrasi untuk Pemerataan

Pemerataan membutuhkan birokrasi yang mampu menargetkan program, mengelola layanan, serta menegakkan aturan secara konsisten. Kapasitas negara adalah variabel distribusi karena kelompok kuat dapat membeli solusi privat sementara kelompok lemah lebih bergantung pada layanan publik.

Digitalization dapat mengurangi discretion serta waktu, tetapi proses harus didesain ulang. Sistem yang kompleks dapat justru mengecualikan warga dengan literacy rendah.

Frontline service quality menentukan pengalaman rakyat. Training, staffing, queue management, complaint, dan data perlu diperbaiki.

Meritocracy birokrasi mendukung pemerataan karena keputusan tidak bergantung pada koneksi. Patronage dapat mengarahkan sumber daya ke jaringan, bukan kebutuhan.

Performance evaluation perlu mengukur outcome layanan, terutama gap antara kelompok serta wilayah, bukan hanya output administratif.

D. Data Sosial Ekonomi yang Lebih Dinamis

Data rumah tangga berubah cepat karena pekerjaan, kelahiran, migrasi, shock kesehatan, dan harga. Registrasi yang diperbarui jarang dapat menghasilkan exclusion atau inclusion error.

Integrasi data administratif membantu, tetapi perlu governance, consent sesuai konteks, security, serta mekanisme koreksi warga. Data tidak boleh menjadi black box yang menentukan hak tanpa appeal.

Dynamic social registry dapat menggunakan update event dari berbagai layanan untuk menandai perubahan, tetapi keputusan akhir perlu rule transparan.

Data daerah penting untuk memahami kerentanan yang tidak terlihat nasional, misalnya wilayah wisata yang shock, daerah tambang, atau pulau kecil.

Statistical system harus tetap independen serta menjaga metodologi agar kebijakan tidak hanya bergantung data operasional yang bias.

E. Kemiskinan Perdesaan dan Produktivitas Desa

Kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa produktivitas pertanian, akses pasar, kualitas layanan, dan diversifikasi non-pertanian tetap kritis. Transfer ke desa membantu, tetapi pembangunan ekonomi lokal perlu lebih dalam.

Agroprocessing, logistics, tourism, renewable energy, repair services, dan digital work dapat memperluas pendapatan di luar pertanian primer.

Land fragmentation dan tenure memengaruhi investasi. Koperasi, service provider, dan contract farming dapat menciptakan scale tanpa menghapus kepemilikan kecil.

Rural road, cold chain, broadband, dan vocational skill menghubungkan desa ke pasar yang lebih besar.

Desa yang berhasil tidak harus menjadi kota, tetapi harus memiliki koneksi yang memungkinkan penduduk memperoleh value lebih tinggi dari sumber daya dan tenaga mereka.

F. Urbanisasi yang Inklusif

Urbanisasi biasanya menaikkan produktivitas karena pekerja berpindah ke kegiatan dengan value lebih tinggi. Namun kota dapat menjadi mesin ketimpangan bila housing, transport, dan layanan tidak mengikuti pertumbuhan.

Slum upgrading sering lebih baik daripada relocation jauh karena mempertahankan livelihood. Infrastruktur air, sanitasi, jalan lokal, tenure security, dan public space meningkatkan kualitas hidup.

Urban planning perlu memungkinkan density di koridor transit dan area pekerjaan. Zoning yang terlalu membatasi supply dapat mendorong harga.

Informal worker membutuhkan ruang ekonomi seperti pasar, logistics zone, dan street vending management, bukan sekadar eviction.

Kota inklusif mengurangi biaya partisipasi dalam ekonomi aglomerasi.

G. Kesejahteraan Pekerja Gig dan Platform

Ekonomi platform memberi fleksibilitas dan entry barrier rendah, tetapi pendapatan dapat volatil dan perlindungan terbatas. Klasifikasi hukum perlu mempertimbangkan tingkat kontrol platform serta dependency pekerja.

Portable social protection dapat mengumpulkan kontribusi dari berbagai sumber pekerjaan. Sistem semacam ini cocok untuk labor market dengan multiple jobs.

Transparansi algoritma terkait suspend, rating, dan fee membantu procedural fairness. Pekerja perlu appeal ketika keputusan otomatis memengaruhi penghasilan.

Competition antarplatform dapat memperbaiki terms, tetapi network effects dapat mengurangi pilihan. Data portability pekerja dan merchant dapat membantu mobility.

Tujuan bukan menghapus gig work, tetapi meningkatkan security dan bargaining tanpa kehilangan fleksibilitas.

H. Kewirausahaan Pemuda

Pemuda sering menghadapi pengalaman terbatas, collateral rendah, dan network sempit. Entrepreneurship program yang hanya memberi pelatihan tanpa market atau mentoring memiliki dampak kecil.

Incubator, procurement, supplier program, dan apprenticeship entrepreneur dapat memberikan pengalaman nyata. Finance perlu mengikuti milestone usaha.

Failure harus memiliki second chance agar entrepreneur tidak terjebak utang permanen. Bankruptcy framework serta credit information berperan.

Digital platform memudahkan entry, tetapi differentiation dan productivity tetap menentukan survival.

Entrepreneurship bukan substitusi job creation; ia salah satu jalur yang harus diberikan pada orang dengan aptitude serta opportunity.

I. Perempuan dalam Ekonomi Produktif

Pemerataan gender membutuhkan akses pendidikan, keamanan, childcare, transport, finance, serta workplace yang bebas harassment. Hambatan sering saling berinteraksi.

Perempuan memiliki proporsi besar pada usaha mikro yang produktivitasnya rendah. Program upgrading perlu mempertimbangkan waktu, care, asset ownership, dan network.

Digital finance dapat memperluas akses tetapi product design harus menghindari over-indebtedness.

Leadership perempuan pada organisasi dapat memperkaya decision-making, tetapi pipeline dimulai dari recruitment, assignment, mentoring, dan promotion fairness.

Gender equality meningkatkan household welfare sekaligus aggregate labor supply dan talent utilization.

J. Penyandang Disabilitas dan Produktivitas Inklusif

Disabilitas sering mengurangi employment bukan karena produktivitas intrinsik, tetapi karena lingkungan tidak accessible. Universal design, assistive technology, flexible work, dan transport dapat menghilangkan barrier.

Perusahaan memerlukan guidance reasonable accommodation dan job matching. Banyak adaptasi memiliki biaya rendah.

Digital work memberi peluang baru tetapi website serta software perlu accessible.

Program pendidikan vokasi perlu memasukkan disability inclusion serta employer partnership.

Ekonomi yang inklusif menggunakan talenta yang sebelumnya terabaikan, sehingga pemerataan dan efisiensi sejalan.

K. Pemuda NEET dan Transisi Sekolah-Kerja

Pemuda yang tidak bekerja, sekolah, atau training berisiko kehilangan pengalaman pada tahap penting. Scarring dapat menurunkan earning jangka panjang.

Career guidance, apprenticeship, job matching, short credential, dan wage subsidy sementara dapat membantu transition.

Data lowongan dan skill demand perlu tersedia bagi sekolah serta pemuda. Informasi yang buruk dapat menghasilkan mismatch.

Program harus membedakan pemuda urban educated, rural, perempuan dengan care burden, dan dropout karena constraint berbeda.

Outcome harus diukur dari employment retention dan wage progression setelah program, bukan enrollment.

L. Pensiun dan Pemerataan Antar-Usia

Pertumbuhan perlu memperhitungkan ageing. Pensiun yang terlalu sempit menciptakan kemiskinan usia tua dan beban pada keluarga muda.

Coverage pekerja informal dapat diperluas melalui kontribusi fleksibel, digital payment, dan subsidy bagi kelompok tertentu.

Pension fund juga membangun aset finansial rumah tangga dan menyediakan long-term capital untuk ekonomi.

Governance sangat penting karena pension adalah tabungan jangka panjang. Transparansi fee serta investasi menentukan return.

Keseimbangan antargenerasi perlu dijaga agar benefit dan contribution berkelanjutan.

M. Energi Rumah Tangga dan Pemerataan

Energi modern meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Akses listrik hampir universal belum berarti affordability dan reliability sama.

Tarif harus memberi sinyal biaya sambil melindungi basic consumption kelompok rentan. Lifeline tariff atau targeted support dapat digunakan.

Rooftop solar dan efficiency dapat menurunkan biaya bagi rumah tangga mampu, tetapi subsidi yang tidak dirancang dapat menguntungkan pemilik rumah saja. Financing untuk kelompok menengah perlu.

Clean cooking serta kualitas udara rumah tetap relevan pada wilayah tertentu.

Energy transition perlu memastikan grid investment di daerah tidak tertinggal.

N. Pemerataan dalam Ekonomi Maritim

Wilayah pesisir dan pulau kecil sering memiliki akses pasar serta layanan lebih mahal. Perikanan, tourism, shipping, aquaculture, dan blue economy dapat menjadi sumber growth jika benefit lokal kuat.

Cold chain serta logistics penting karena produk mudah rusak. Tanpa itu, nelayan memiliki bargaining lemah. Resource management diperlukan agar peningkatan value tidak berubah menjadi overfishing. Nilai per kilogram lebih penting daripada volume maksimum.

Marine spatial planning perlu menghindari konflik antara nelayan, tourism, conservation, energy, dan port.

Pendidikan serta layanan kesehatan pulau kecil memerlukan model khusus karena unit cost tinggi.

O. Pemerataan dan Kepercayaan pada Institusi

Ketimpangan yang dianggap tidak adil dapat menurunkan trust bahkan ketika indikator material membaik. Persepsi fairness dipengaruhi apakah aturan berlaku sama, corruption, access public service, dan mobility.

Transparency dalam pajak, subsidi, procurement, serta penerima program membantu legitimacy. Warga lebih menerima reformasi bila alasan serta kompensasi jelas.

Complaint serta appeal memungkinkan koreksi dan memberi rasa procedural justice.

Trust juga memengaruhi ekonomi melalui compliance, cooperation, dan willingness berinvestasi jangka panjang.

Pemerataan institusional berarti akses terhadap hukum dan administrasi tidak ditentukan koneksi.

Penutup Akhir: Agenda Indonesia yang Bertumbuh dan Merata

Indonesia dapat membangun model pembangunan yang tidak memisahkan pertumbuhan dari pemerataan. Keduanya dapat dirancang sebagai proses yang saling memperkuat: produktivitas menciptakan pendapatan, pendapatan membangun human capital serta demand, dan human capital kembali meningkatkan produktivitas.

Agenda tersebut membutuhkan disiplin untuk memilih kebijakan yang benar-benar memperluas kemampuan. Transfer tetap penting, tetapi harus berdampingan dengan pekerjaan, aset, dan layanan.

Pemerataan juga harus dipahami sebagai kualitas sistem, bukan hasil satu program kementerian. Pajak, industri, pendidikan, kota, teknologi, kesehatan, energi, dan pemerintahan semuanya memengaruhi distribusi.

Data 2025-2026 memberi dasar optimisme karena pertumbuhan tetap positif, kemiskinan turun, dan Gini pengeluaran membaik. Namun keberhasilan awal tidak boleh membuat agenda mobilitas dan kualitas terabaikan.

Pekerjaan produktif harus menjadi pusat karena memberi pendapatan, identitas, pengalaman, dan jalur karier. Kebijakan yang menciptakan output tanpa pekerjaan perlu diimbangi sektor serta supplier yang lebih labor-absorbing.

Kelas menengah yang aman akan menjadi kekuatan stabilitas ekonomi. Mereka membutuhkan housing, pension, health, education, serta pekerjaan yang memungkinkan saving.

Kelompok rentan membutuhkan safety net yang mampu merespons guncangan sebelum aset dan human capital rusak.

Daerah membutuhkan kapasitas serta ekosistem lokal agar investasi menghasilkan multiplier. Pemerataan wilayah bukan sekadar statistik lokasi proyek.

Kota perlu tetap produktif tetapi terjangkau. Housing dan transport menjadi jembatan antara aglomerasi dan inclusion.

Teknologi perlu menjadi alat mobility. AI, cloud, dan platform dapat membuka opportunity, tetapi policy harus mencegah concentration dan skill exclusion.

Transisi hijau perlu menjadi sumber pekerjaan serta industri baru, sambil memberi jalur bagi pekerja dan komunitas yang terdampak.

Pajak dan subsidi harus dipandang sebagai sistem kontrak sosial. Fairness, simplicity, dan visible services menentukan penerimaan publik.

Pemerintah daerah dan pusat perlu berbagi tanggung jawab secara jelas. Standard nasional menjaga hak minimum; fleksibilitas lokal memungkinkan inovasi.

Perguruan tinggi dapat membantu dengan riset, data, evaluasi, dan pendidikan manajer yang memahami bahwa keputusan bisnis memiliki konsekuensi sosial.

Bisnis juga memiliki peran melalui upah, training, supplier, lokasi, safety, serta teknologi. Shared prosperity dapat menjadi strategi kompetitif ketika meningkatkan retention dan ecosystem.

Pada 2045, pencapaian terbesar bukan hanya status pendapatan tinggi, tetapi masyarakat yang memiliki peluang lebih luas untuk berpindah kelas dan membangun kehidupan aman.

Mobilitas sosial adalah bukti bahwa ekonomi menghargai kemampuan, bukan hanya warisan atau koneksi.

Jika anak dari keluarga miskin memiliki akses sekolah bermutu, transportasi, internet, kesehatan, dan pekerjaan produktif, pertumbuhan menjadi lebih dari statistik.

Jika petani dan UMKM dapat naik produktivitas melalui teknologi serta pasar, pemerataan berlangsung melalui produksi, bukan bantuan semata.

Jika pekerja menerima bagian wajar dari productivity gain dan dapat membangun aset, kelas menengah menjadi lebih luas.

Jika kota kecil dan daerah luar Jawa memiliki pusat ekonomi, universitas, dan layanan, pembangunan menjadi lebih seimbang tanpa mengurangi manfaat aglomerasi.

Semua agenda tersebut membutuhkan waktu, tetapi arah dapat ditetapkan sekarang melalui indikator serta evaluasi yang tepat.

Indonesia perlu mengukur bukan hanya berapa besar ekonomi bertambah setiap tahun, tetapi berapa besar kapasitas warga bertambah untuk belajar, bekerja, berusaha, memiliki, dan menghadapi risiko.

Ketika kapasitas tersebut semakin merata, pertumbuhan akan memiliki basis sosial yang lebih luas dan lebih tahan lama.

Dari pertumbuhan ke pemerataan bukan perubahan dari ekonomi menuju sosial. Ia adalah perubahan dari ukuran ekonomi yang sempit menuju strategi ekonomi yang lebih lengkap.

Strategi tersebut memandang setiap warga sebagai sumber produktivitas potensial yang nilainya dapat berkembang bila hambatan kesempatan dikurangi.

Dengan demikian, pemerataan bukan akhir dari pertumbuhan. Pemerataan adalah cara memperluas mesin pertumbuhan itu sendiri.

Lampiran Penajaman: Lima Agenda Kritis Pemerataan 2026-2030

1. Menaikkan Upah Riil melalui Produktivitas dan Formalisasi

Agenda pertama adalah memastikan bahwa pertumbuhan produktivitas benar-benar tercermin pada pendapatan pekerja. Kebijakan upah minimum tetap memiliki fungsi sebagai lantai, tetapi tidak cukup bila sebagian besar pekerja berada di sektor informal atau perusahaan berproduktivitas rendah. Karena itu, strategi upah perlu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas perusahaan, upgrading manajemen, digitalisasi proses, serta akses pasar.

Formalisasi juga perlu menjadi jalan menuju manfaat nyata. Perusahaan kecil akan lebih bersedia formal bila memperoleh akses pembiayaan, procurement, perlindungan hukum, standard, dan program upgrading. Pekerja akan lebih tertarik pada hubungan kerja formal bila mendapatkan jaminan sosial, perlindungan kecelakaan, dan jalur karier.

Peran pemerintah adalah menciptakan lingkungan di mana perusahaan produktif dapat tumbuh dan perusahaan tidak produktif memiliki insentif memperbaiki diri atau keluar secara tertib. Produktivitas agregat naik ketika tenaga kerja berpindah ke perusahaan yang lebih efisien.

Monitoring upah perlu melihat median, kuintil, gender, sektor, wilayah, dan pendidikan. Average wage saja dapat menyembunyikan gap besar. Upah riil juga harus disesuaikan dengan inflasi yang benar-benar dialami rumah tangga.

Jika produktivitas, formalitas, dan wage progression berjalan bersama, pasar kerja menjadi saluran utama pemerataan yang berkelanjutan.

2. Mengurangi Beban Biaya Tetap Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga tidak dapat dibaca terpisah dari biaya hidup. Perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, energi, dan childcare merupakan fixed cost yang menentukan disposable income. Di kota besar, kenaikan gaji dapat habis untuk sewa dan perjalanan.

Agenda pemerataan perlu memandang layanan publik sebagai cara meningkatkan disposable income tanpa harus selalu melalui transfer. Bus yang cepat dan murah, sekolah publik bermutu, health care yang dipercaya, serta housing supply yang cukup memiliki efek ekonomi langsung.

Pengukuran cost of living perlu lebih rinci menurut kota dan tipe rumah tangga. Kebijakan nasional dapat terlihat murah secara rata-rata tetapi mahal bagi pekerja metropolitan atau keluarga dengan anak.

Perumahan harus menjadi prioritas karena ia sekaligus aset dan konsumsi. Kenaikan harga rumah yang jauh lebih cepat dari upah memperbesar wealth gap antara pemilik dan non-pemilik.

Menurunkan fixed cost rumah tangga dapat memperkuat saving, konsumsi produktif, dan kemampuan mengambil risiko usaha.

3. Memperluas Kepemilikan Aset Produktif

Pendapatan memberi kemampuan konsumsi, tetapi aset memberi resilience. Rumah tangga dengan tabungan, rumah, pensiun, atau usaha lebih mampu menghadapi shock dibanding rumah tangga dengan pendapatan serupa tetapi tidak memiliki buffer.

Program asset-building dapat berbentuk pension inclusion, matched savings bagi kelompok tertentu, financial literacy yang disertai consumer protection, serta pembiayaan rumah yang terjangkau. Untuk pelaku usaha, aset produktif dapat berupa mesin, inventory, hak kekayaan intelektual, atau data.

Perlu dihindari kebijakan yang mendorong kepemilikan aset melalui utang yang terlalu berat. Housing finance, misalnya, harus mempertimbangkan affordability sepanjang siklus bunga dan pendapatan.

Asset policy juga berkaitan dengan land administration. Kepastian hak, registrasi, dan valuasi dapat meningkatkan akses pembiayaan sekaligus memperbaiki basis pajak properti.

Perluasan kepemilikan aset merupakan jalan jangka panjang menuju kelas menengah yang lebih aman dan ketimpangan kekayaan yang lebih rendah.

4. Mempercepat Mobilitas Antar-Wilayah

Kesempatan ekonomi tidak tersebar merata. Kebijakan tidak harus memaksa seluruh wilayah memiliki produktivitas sama, tetapi perlu memberi warga kemampuan mengakses pusat kesempatan melalui transportasi, migrasi, pendidikan, atau digital work.

Mobilitas tenaga kerja membutuhkan portability layanan publik. Warga yang pindah kota seharusnya dapat mempertahankan akses jaminan sosial, health, dan pendidikan anak tanpa hambatan administratif besar.

Kota tujuan perlu meningkatkan supply housing dan transit agar migrasi produktif tidak berubah menjadi kepadatan yang mahal. Sebaliknya, daerah asal perlu memiliki strategi memanfaatkan remittance dan diaspora.

Transportasi antarwilayah, pelabuhan, bandara, dan broadband menurunkan biaya jarak. Namun connectivity harus diikuti skill agar penduduk lokal dapat menangkap manfaat.

Mobilitas geografis yang aman memperbesar equality of opportunity karena orang tidak sepenuhnya terikat produktivitas tempat kelahirannya.

5. Membangun Sistem Evaluasi Pemerataan yang Kredibel

Agenda pemerataan membutuhkan pengukuran yang konsisten dan independen. Tanpa indikator yang dipercaya, kebijakan mudah berubah menjadi kompetisi narasi. BPS tetap memiliki peran sentral sebagai penyedia statistik resmi, sementara data administratif dapat memperkaya frekuensi dan detail.

Evaluasi program perlu menggunakan baseline, kelompok pembanding jika mungkin, serta outcome yang relevan. Jumlah peserta pelatihan, rumah dibangun, atau aplikasi diluncurkan tidak cukup jika employment, affordability, atau produktivitas tidak membaik.

Distributional impact assessment dapat diwajibkan pada reformasi besar seperti pajak, subsidi, energi, transportasi, dan kebijakan digital. Analisis harus menunjukkan kelompok yang menang dan kalah serta mekanisme kompensasi.

Public dashboard perlu sederhana untuk komunikasi, tetapi data teknis dan metodologi harus tersedia bagi peneliti. Transparansi memungkinkan koreksi dan pembelajaran.

Budaya evaluasi yang kuat membuat pemerataan menjadi agenda manajemen pembangunan, bukan hanya cita-cita normatif.

Penutup Reflektif Final

Ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemampuan tumbuh secara konsisten dan menurunkan kemiskinan. Tantangan dekade berikut bukan mengganti keberhasilan itu, melainkan memperdalamnya agar peningkatan produktivitas menjangkau lebih banyak rumah tangga dan wilayah.

Pemerataan yang substantif tidak dapat dicapai oleh satu kementerian atau satu jenis anggaran. Ia merupakan hasil interaksi pasar kerja, perusahaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, pajak, perlindungan sosial, teknologi, serta tata kelola daerah.

Karena itu, koordinasi kebijakan harus berpusat pada outcome. Setiap program perlu ditanya: apakah membuka pekerjaan lebih baik, menurunkan biaya hidup, meningkatkan aset, memperbaiki mobilitas, atau memperkuat resilience?

Pertanyaan tersebut juga relevan bagi bisnis. Strategi perusahaan memengaruhi distribusi melalui wage, supplier, lokasi, training, dan technology adoption. Perusahaan yang membangun ecosystem sering memperoleh supply chain dan talent yang lebih kuat.

Perguruan tinggi memiliki peran menjaga kualitas analisis, menguji klaim, serta mendidik pemimpin yang memahami hubungan antara produktivitas dan fairness. Manajemen modern perlu melihat distribusi sebagai bagian strategy, bukan hanya compliance.

Indonesia menuju 2045 akan menghadapi AI, ageing, climate transition, urbanization, dan geopolitics. Semua perubahan ini dapat meningkatkan atau menurunkan pemerataan tergantung desain kebijakan.

AI dapat memperbesar productivity gap atau memperluas kemampuan UMKM. Energi hijau dapat menciptakan industri baru atau meninggalkan daerah lama. Urbanisasi dapat membuka mobilitas atau menciptakan housing crisis. Tidak ada outcome yang otomatis.

Karena itu, pemerataan harus menjadi prinsip desain adaptif. Setiap transformasi perlu memiliki jalur bagi mereka yang tertinggal untuk memperoleh skill, akses, dan perlindungan.

Tujuan akhir bukan membuat masyarakat tanpa perbedaan, tetapi masyarakat dengan perbedaan yang tidak membeku menjadi kasta ekonomi. Orang harus memiliki kemungkinan nyata untuk maju melalui pendidikan, kerja, usaha, dan aset.

Ketika mobilitas meningkat, pertumbuhan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Masyarakat melihat bahwa ekonomi bukan permainan tertutup bagi kelompok tertentu.

Ketika layanan publik berkualitas, pendapatan efektif rumah tangga meningkat dan trust pada negara dapat menguat. Ketika perusahaan produktif tumbuh, wage ladder dan tax base ikut melebar.

Ketika daerah memperoleh ekosistem ekonomi, konsentrasi tidak lagi berarti keterputusan nasional. Ketika aset lebih luas dimiliki, kelas menengah menjadi lebih stabil.

Dengan demikian, agenda dari pertumbuhan ke pemerataan adalah agenda membangun sistem transmisi yang utuh dari produktivitas menuju kehidupan sehari-hari.

Indonesia tidak perlu meninggalkan ambisi pertumbuhan. Yang diperlukan adalah menanyakan dengan lebih ketat kualitas pertumbuhan, siapa yang ikut menghasilkan, siapa yang ikut menikmati, dan kemampuan apa yang diwariskan.

Jika pertumbuhan menjadi mesin yang memperluas kesempatan, meningkatkan aset, dan memperkuat rasa aman, maka pemerataan bukan biaya pembangunan. Pemerataan adalah bentuk pembangunan yang paling produktif dan paling tahan lama.

Catatan Penegasan tentang Pemerataan dan Produktivitas

Hubungan antara pemerataan dan produktivitas perlu ditempatkan secara seimbang. Kebijakan yang hanya mengejar pemerataan nominal tetapi melemahkan insentif investasi dapat mengurangi sumber daya yang

tersedia untuk dibagi pada masa depan. Sebaliknya, kebijakan yang hanya mengejar efisiensi tanpa memperhatikan distribusi dapat menghasilkan resistensi sosial, underinvestment pada human capital kelompok bawah, serta kehilangan talenta. Pendekatan terbaik adalah mencari kebijakan yang memiliki manfaat ganda: meningkatkan kemampuan produktif sekaligus memperluas akses.

Contohnya adalah pendidikan anak usia dini berkualitas. Kebijakan ini membantu keluarga berpendapatan rendah, meningkatkan partisipasi kerja orang tua, memperbaiki perkembangan anak, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Transportasi umum yang baik juga memiliki manfaat ganda: menurunkan biaya rumah tangga sekaligus memperluas labor market dan mengurangi kemacetan. Reformasi semacam ini menunjukkan bahwa agenda pemerataan dapat dirancang sebagai agenda efisiensi.

Pemerataan juga perlu memperhatikan waktu. Sebagian kebijakan memberikan manfaat cepat, seperti transfer pada masa shock atau stabilisasi harga pangan. Kebijakan lain bekerja lambat, seperti perbaikan sekolah, perumahan, dan asset-building. Portofolio kebijakan perlu memadukan horizon pendek dan panjang agar masyarakat memperoleh perlindungan sekarang sekaligus peluang lebih baik nanti.

Keberhasilan pemerataan tidak dapat bergantung pada pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah mengetahui kondisi lokal, perusahaan menentukan praktik kerja serta supplier, perguruan tinggi mengembangkan talenta, dan masyarakat memberikan informasi mengenai hambatan nyata. Mekanisme kolaborasi perlu membagi peran secara jelas dan mencegah tanggung jawab menjadi kabur.

Pada tingkat mikro, fairness memiliki efek pada perilaku. Pekerja yang merasa proses promosi adil lebih mungkin berkomitmen; UMKM yang memperoleh akses procurement transparan lebih berani berinvestasi; warga yang melihat pajak digunakan untuk layanan lebih mungkin patuh. Dengan demikian, procedural justice memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata.

Pada tingkat makro, pemerataan memperluas basis permintaan dan tabungan domestik. Kelas menengah yang tumbuh dapat mendukung pasar produk berkualitas, jasa profesional, asuransi, pendidikan, dan investasi. Ekonomi menjadi kurang bergantung pada konsumsi sangat rendah atau kemewahan kelompok sempit.

Pemerataan spasial juga tidak berarti mengabaikan keunggulan aglomerasi. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota besar lain memiliki jaringan yang produktif. Strategi yang lebih tepat adalah memperbaiki keterhubungan dan membangun kota lapis kedua yang dapat mengambil sebagian fungsi ekonomi, sehingga network nasional semakin kuat.

Untuk wilayah kepulauan, biaya pelayanan memang lebih tinggi. Prinsip pemerataan harus menerima bahwa equal treatment kadang membutuhkan unequal resources. Sekolah, kesehatan, konektivitas, dan transportasi pada pulau kecil memerlukan formula pembiayaan yang memperhitungkan geografi.

Ke depan, Indonesia juga perlu memperhatikan ketimpangan digital sebagai bentuk baru ketimpangan modal. Data, komputasi, software, dan kemampuan AI dapat menjadi aset produktif seperti mesin. Jika hanya perusahaan besar yang memiliki akses, productivity gap akan melebar. Shared infrastructure, training, dan standard terbuka dapat mengurangi.

Keseluruhan agenda ini mengarah pada satu prinsip: pemerataan yang baik memperbesar jumlah orang dan organisasi yang mampu berpartisipasi pada kegiatan bernilai tinggi. Ketika partisipasi produktif meluas, pertumbuhan memiliki basis yang lebih besar, stabil, dan inovatif. Inilah alasan mengapa agenda dari pertumbuhan ke pemerataan seharusnya dipahami bukan sebagai perubahan prioritas dari ekonomi ke sosial, tetapi sebagai peningkatan kualitas strategi ekonomi nasional.

Sebagai penutup tambahan, agenda pemerataan perlu dijaga dari dua penyederhanaan. Pertama, menganggap bahwa setiap perbedaan pendapatan merupakan kegagalan kebijakan. Dalam ekonomi dinamis, perbedaan

dapat mencerminkan skill, risiko, inovasi, lokasi, dan pilihan. Yang perlu dicegah adalah ketika perbedaan tersebut menjadi permanen karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, hukum, atau pasar ditutup bagi sebagian kelompok. Kedua, menganggap bahwa pertumbuhan dengan sendirinya akan menyelesaikan semua ketimpangan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa institusi, pajak, pasar kerja, perumahan, dan struktur kepemilikan sangat menentukan bagaimana hasil pertumbuhan tersebar.

Indonesia perlu membangun budaya kebijakan yang terus menanyakan apakah sebuah intervensi meningkatkan kemampuan masyarakat. Subsidi yang hanya menurunkan harga hari ini tetapi tidak memperkuat kapasitas produksi perlu dibandingkan dengan investasi pada transportasi, sekolah, kesehatan, atau efisiensi. Infrastruktur yang besar perlu dibandingkan dengan alternatif yang mungkin memberi akses lebih luas. Program digital perlu diuji apakah benar mengurangi biaya atau hanya menambah aplikasi. Dengan pertanyaan seperti ini, pemerataan menjadi bagian dari manajemen kinerja negara.

Pada akhirnya, agenda pemerataan adalah agenda tentang martabat ekonomi. Warga membutuhkan lebih dari sekadar bertahan; mereka membutuhkan kemungkinan untuk merencanakan, menabung, mendidik anak, memiliki rumah atau usaha, berpindah pekerjaan, dan menghadapi krisis tanpa kehilangan seluruh kemajuan. Ekonomi yang mampu menyediakan kemungkinan tersebut akan memiliki kelas menengah yang lebih kuat, mobilitas yang lebih tinggi, dan dukungan sosial yang lebih luas terhadap perubahan.

Dari perspektif ini, Indonesia Emas 2045 sebaiknya diukur bukan hanya dari apakah pendapatan per kapita mencapai kategori tinggi, tetapi juga apakah kesempatan ekonomi semakin tidak ditentukan oleh tempat lahir, kekayaan orang tua, atau koneksi. Semakin besar peran kemampuan, kerja, inovasi, dan institusi yang adil dalam menentukan hasil, semakin matang pula pembangunan Indonesia. Pertumbuhan memberi energi bagi proses itu; pemerataan memastikan energinya menjangkau seluruh sistem sosial.

Ukuran paling praktis untuk menjaga arah tersebut adalah menanyakan warisan apa yang ditinggalkan oleh setiap kebijakan. Program yang baik meninggalkan pekerja yang lebih terampil, perusahaan yang lebih produktif, rumah tangga yang memiliki aset lebih kuat, daerah yang memiliki kapasitas lebih baik, dan layanan publik yang makin dapat dipercaya. Jika suatu program hanya meninggalkan pengeluaran tanpa kemampuan baru, maka manfaatnya perlu dipertanyakan. Sebaliknya, ketika investasi publik maupun swasta menghasilkan pengetahuan, jaringan pemasok, akses pasar, infrastruktur sosial, dan mobilitas, nilai ekonominya melampaui angka transaksi awal. Kerangka ini membantu menyatukan agenda pertumbuhan dan pemerataan dalam satu bahasa manajemen pembangunan: setiap rupiah, proyek, dan reformasi dinilai dari seberapa besar ia memperluas kapasitas produktif dan kesempatan masyarakat. Dengan disiplin tersebut, Indonesia dapat membangun ekonomi yang tidak hanya lebih besar, tetapi juga lebih dalam, lebih tahan terhadap guncangan, dan lebih luas kepemilikannya. Pemerataan lalu menjadi proses memperbanyak pelaku yang mampu menciptakan nilai, bukan sekadar membagi hasil yang sudah ada.

Karena itu, keberhasilan jangka panjang perlu dibaca sebagai perubahan struktur peluang. Ketika lebih banyak keluarga dapat bertahan dari guncangan tanpa menjual aset, lebih banyak pekerja memperoleh jalur kenaikan upah, lebih banyak usaha mampu tumbuh menjadi perusahaan menengah, dan lebih banyak daerah memiliki pusat produktivitas sendiri, maka pembangunan telah bergerak dari sekadar peningkatan output menuju peningkatan kapasitas masyarakat. Ini adalah bentuk pemerataan yang paling sehat karena memperkuat kemandirian sekaligus solidaritas. Negara tetap hadir sebagai penjamin kesempatan dasar dan pelindung dari risiko besar, sementara pasar, perusahaan, dan warga memperoleh ruang untuk berinovasi serta menciptakan nilai. Keseimbangan inilah yang dapat membuat pertumbuhan Indonesia semakin inklusif, berdaya tahan, dan bermakna bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.